

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



KOMPILASI KLIPING MEDIA CETAK KEMENTERIAN PERTANIAN RI

13 JUNI 2024

-Biro Humas dan Informasi Publik-

Title	Resmikan Penggilingan Padi	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	6	
Author	Antara/Dhedez Anggara	

» Resmikan Penggilingan Padi



ANTARA/DEHDEZ ANGGARA

» Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kanan) didampingi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi (tengah) melihat beras hasil penggilingan usai peresmian Rice milling milik Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di desa Kalensari, Widasari, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (11/6). Menkop berharap penggilingan padi tersebut bisa memberikan kesejahteraan bagi petani setempat.

Title	Geliat Ekonomi Masih Ditopang Sektor Jasa	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Ers/E-10	

Kinerja Perekonomian

Geliat Ekonomi Masih Ditopang Sektor Jasa

JAKARTA – Pemerintah diharapkan mendorong pertumbuhan dengan mengandalkan sektor riil lantaran sejak pandemi, geliat ekonomi masih ditopang oleh sektor jasa yang memiliki nilai tambah rendah. Padahal, semestinya industri dan pertanian menjadi tumpuan utama.

Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi menjelaskan penurunan tingkat kemiskinan pasca pandemi, masih bergantung pada dukungan bantuan sosial pemerintah di berbagai lini, sementara geliat ekonomi yang tumbuh lebih banyak di sektor jasa yang nilai tambahnya relatif rendah dan padat dengan informalitas.

Selain itu, dengan melihat ekonomi sektor jasa, maka konsentrasi jelas di kota-kota besar dan merembet ke sekitarnya terutama di Jawa. “Sedangkan industri dan pertanian yang menjadi basis utama penyerap tenaga kerja formal masih terseok-seok, pertanian pertumbuhannya sangat kecil 1,3 persen pada 2023, dan industri 4,64 persen. Pada kuartal I-2024 bahkan pertanian negatif 0,41 persen, sedang industri hanya 0,68 persen dibanding periode sama tahun lalu (YoY),” ucap Hafidz kepada *Koran Jakarta*, Rabu (12/6).

Konsekuensinya lanjut Hafidz, energi pertumbuhan

melemah, itu pun di sektor industri lebih didominasi oleh smelter yang digenjot secara besar-besaran di Sulawesi Tenggara. Karenanya, tren pertumbuhan kawasannya Sulawesi dan Maluku-Papua bisa di atas enam persen. “Sayangnya, (pertumbuhan itu) tidak melahirkan *multiplayer effect* ke sektor industri turunan atau ke sektor-sektor

« Sayangnya, (pertumbuhan itu) tidak melahirkan *multiplayer effect* ke sektor industri turunan atau ke sektor-sektor lainnya. »

HAFIDZ ARFANDI
Peneliti Sustainability Learning Center

lainnya. Walau tak bisa dipungkiri kontribusinya pada stabilitas devisa dan neraca perdagangan positif sangat besar di tengah lesunya komoditas andalan, sawit dan batu bara,” paparnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan APBN harus memiliki kontribusi bagi sektor riil apabila akan digunakan sebagai alat membangkitkan kegiatan ekonomi tanah air. “Kalau kita ingin APBN itu menjadi pen-

gungkit, spending better-nya harus betul-betul untuk sektor riil yang membangkitkan kegiatan ekonomi. Masih banyak yang bisa kita lakukan,” kata Zulfikar usai menghadiri diskusi Forum Legislasi bertema *Mengupas RAPBN 2025 Menuju Indonesia Maju*, di Jakarta, Selasa (11/6).

Apabila diberikan ruang APBN untuk sektor riil, lanjutnya, bukan tak mungkin pertumbuhan di luar Jawa bisa menyentuh angka 7-8 persen. Untuk itu, hilirisasi yang awalnya dilakukan untuk sektor mineral dan batu bara (min-erba) harus juga menyasar sektor lainnya.

Keberhasilan Vietnam

Zulfikar mencontohkan Vietnam berhasil meningkatkan nilai jual dari sektor kelautannya dengan adanya hilirisasi. Hilirisasi seharusnya tak berkutat pada nikel dan bauksit semata. Dia kembali menegaskan masih banyak sektor yang bisa digarap dan berujung pada mengeliatnya sektor industri tanah air.

“Tidak hanya nikel, tidak hanya bauksit (tapi) banyak yang perlu dikembangkan lagi. Kalau industri jalan, (pekerjaan kan ada. Kalau pekerjaan ada, kan penghasilan ada. Nah itu maksud saya spending better-nya ke sana,” tutup legislator Dapil Jawa Timur III itu. ■ **ers/E-10**

Title	Studi: Emisi Dinitrogen Oksida yang Melonjak Menjadi Ancaman Iklim	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	12	
Author	SB/N-3	

Pemanasan Global

Studi: Emisi Dinitrogen Oksida yang Melonjak Menjadi Ancaman Iklim

CANBERRA - Menurut temuan penelitian Global Nitrous Oxide Budget yang diterbitkan pada hari Rabu (12/6), emisi global nitrous oksida, jenis gas rumah kaca yang kuat, telah melampaui perkiraan dan menempatkan tujuan perubahan iklim dalam bahaya.

Berdasarkan jutaan pengukuran atmosfer di seluruh dunia, laporan tersebut mengungkapkan peningkatan tajam kadar oksida nitrat yang berhubungan dengan manusia.

Dikutip dari *The Business Times*, temuan ini meningkatkan kekhawatiran para peneliti terlalu sedikit upaya yang dilakukan untuk mengendalikan gas, yang sebagian besar dihasilkan oleh pertanian.

Nitrous oksida memanaskan atmosfer bumi 300 kali lebih efektif dibandingkan karbon dioksida dan dapat bertahan selama lebih dari satu abad. Menurut studi yang mengandalkan keahlian 58 peneliti internasional ini, emisi melonjak 40 persen dalam empat dekade hingga tahun 2020.

Akibatnya, kadar gas di atmosfer meningkat menjadi 336 bagian per miliar pada tahun 2022, peningkatan sebesar 25 persen dibandingkan tingkat pra-industrialisasi.

Penulis utama laporan, Hanqin Tian dari Boston College, mengatakan lonjakan tersebut jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya oleh

panel ilmuwan iklim PBB, Intergovernmental Panel on Climate Change.

"Emisi oksida nitrat harus diturunkan jika pemanasan global ingin dibatasi pada target Perjanjian Paris sebesar 2 derajat Celsius," kata Tian.

Mengurangi emisi dinitrogen oksida adalah satu-satunya solusi karena saat ini belum ada teknologi yang dapat menghilangkan dinitrogen oksida dari atmosfer.

Mencemari Tanah

Nitrous oksida adalah salah satu dari tiga gas rumah kaca utama, bersama dengan karbon dioksida dan metana, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim yang disebab-

kan oleh manusia. Hal ini juga mencemari tanah, air, dan udara, serta menipisnya lapisan ozon.

"Peningkatan emisi ini terjadi ketika gas rumah kaca global seharusnya menurun dengan cepat menuju emisi nol bersih jika kita memiliki peluang untuk menghindari dampak terburuk perubahan iklim," kata Tian.

Pertanian adalah penyebab terbesar, menyumbang hampir tiga perempat dari oksida nitrat yang disebabkan oleh manusia atau antropogenik, dalam 10 tahun hingga tahun 2020. Penyebab lainnya adalah bahan bakar fosil, limbah dan air limbah, serta pembakaran biomassa. ■ **SB/N-3**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	ANGGARAN PERTANIAN UNTUK HADAPI EL NINO	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	11	
Author	Antara/Dhedez Anggara	

■ ANGGARAN PERTANIAN UNTUK HADAPI EL NINO



Antara/Dedhez Anggara

Sejumlah petani menanam padi di areal sawah desa Sindang, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (12/6). Kementerian Pertanian memfokuskan kembali atau *refocusing* anggaran senilai Rp7 triliun untuk membantu

petani menghadapi El Nino dan kemarau atau kekeringan di tiga bulan masa kritis periode Agustus hingga Oktober 2024.

Title	Bulog Jajaki Perusahaan Kamboja	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	5	
Author	Ni Luh Anggela	

| PEMENUHAN STOK BERAS |

Bulog Jajaki Perusahaan Kamboja

Bisnis, JAKARTA — Perusahaan Umum Bulog telah menjajaki beberapa pelaku usaha beras di Kamboja sebagai tindak lanjut instruksi mengakuisisi perusahaan beras asal negara itu sebagai bentuk pengamanan stok pangan.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan Perum Bulog juga telah berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja.

Sejauh ini, Bayu menyebutkan bahwa Bulog telah melakukan kerja sama perdagangan beras dengan Kamboja, baik melalui skema *business to business* maupun *government to government* pada 2023 dan awal 2024.

“Kami juga telah melakukan pembicaraan awal dengan perbankan nasional terkait peluang investasi tersebut,”

ujarnya, Rabu (12/6).

Dia menyatakan siap mengakuisisi sejumlah perusahaan asing sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Pada dasarnya kami siap melaksanakan penugasan tersebut,” kata Bayu.

Sementara itu, Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar) Syaiful Bahari mengkhawatirkan rencana pemerintah mengakuisisi pabrik beras di Kamboja mengancam bisnis industri beras rakyat di dalam negeri.

Dia memandang, rencana pemerintah mengambil alih bisnis pabrik beras di Kamboja tidak logis. Alasannya, Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan dengan Kamboja dari sisi potensi lahan padi.

“Potensi lahan padi Indonesia yang belum dimanfaatkan di lahan kering ada 25 juta hektare. Akuisisi usaha beras di Kamboja itu pemi-

kiran yang tidak mendasar dan tidak logis,” kata Syaiful saat dihubungi *Bisnis*.

Dia blak-blakan soal dampak akuisisi tersebut terhadap nasib usaha penggilingan beras rakyat.

Dengan mengambil alih produsen beras di Kamboja, dia menyatakan industri beras rakyat makin tertekan dengan gempuran beras impor di tengah biaya produksi yang kian mahal. Dampak itu makin parah dirasakan oleh penggilingan rakyat yang hanya mampu menghasilkan beras kualitas medium.

Pemerhati pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian berharap pemerintah memprioritaskan upaya menggenjot produksi beras di dalam negeri.

“Bukannya mengoptimalkan dari dalam negeri, malah bekerja keras mendatangkan beras impor,” ujar Eliza. *(Ni Luh Anggela)*

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Title	KESEHATAN HEWAN KURBAN	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	18	
Author	Bisnis/Muhammad Noli Hendra	

■ KESEHATAN HEWAN KURBAN



Bisnis/Muhammad Noli Hendra

Pekerja melakukan pembersihan kandang sapi yang ada di Kota Padang, Sumatra Barat, Rabu (12/6). Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar mencatat terdapat sebanyak 45.000 ekor

hewan kurban pada Iduladha tahun ini dan belum ada laporan ditemukannya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan kurban pada setiap dilakukan pemeriksaan.

Title	KRISIS INTAI LUMBUNG BERAS
Date	13 Juni 2024
Media	Bisnis Indonesia
Page	18
Author	M. Noli Hendra



| DAMPAK BENCANA ALAM |

KRISIS INTAI LUMBUNG BERAS

Tipisnya ketersediaan beras di Provinsi Sumatra Barat perlu perhatian serius lantaran wilayah ini merupakan salah satu lumbung padi nasional. Banjir pada sejumlah daerah disinyalir menjadi faktor utamanya turunnya produksi padi provinsi ini.

M. Noli Hendra
redaksi@bisnis.com

Bahkan, kondisi tersebut diakui oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatra Barat yang mengungkapkan bahwa ketersediaan beras di daerah itu tengah melalui masa-masa kritis yang diperkirakan bakal berlangsung hingga Juli 2024.

Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar Syaiful Bahri mengatakan bahwa bencana alam yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota pada tahun ini telah memberikan dampak kepada sektor pertanian, terutama padi. "Kami memperkirakan pada Juli 2024 itu ketersediaan beras tipis, hanya ada 5.000 ton. Dan jumlah itu hanya cukup untuk 3 hari memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh daerah di Sumbar," katanya, Rabu (12/6/).

Dia menjelaskan bahwa guna menambah kekurangan ketersediaan itu, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) telah melakukan koordinasi dengan Perum Bulog Wilayah Sumbar. Hasilnya, Bulog siap untuk mengalokasikan pendistribusian beras sebanyak 20.000 ton.

"Beras yang akan didistribusikan Bulog itu beras yang datang dari luar daerah dan kemungkinan ada dari beras impor," jelasnya.

Syaiful mengatakan bahwa kondisi bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang, telah menyebabkan ribuan lahan pertanian mengalami gagal panen.

Sementara, imbuhnya, untuk daerah yang memiliki produksi beras terbanyak itu berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Solok.

"Nah, Pesisir Selatan dilanda bencana alam, makanya dampaknya sangat terasa," ujarnya. Padahal sebelum adanya bencana alam, provinsi ini justru mencatatkan surplus beras hingga 20.000 ton.

Oleh sebab itu, Pemprov Sumbar memang perlu melakukan langkah antisipasi, sehingga kondisi ketersediaan beras bisa tercukupi.

"Persoalan ketersediaan beras ini kami memang berkoordinasi dengan Bulog," katanya.

Syaiful memperkirakan bahwa terhitung Agustus 2024 hingga seterusnya, produksi beras di Sumbar akan berangsur meningkat secara bertahap lantaran Kementerian Pertanian akan memulai melakukan pemulihan lahan untuk daerah yang lahan pertaniannya terdampak bencana alam.

"Jadi sebelumnya Gubernur Sumbar telah bertemu langsung dengan Menteri Pertanian. Hasilnya, pemerintah pusat akan bantu pemulihan lahan. Inilah yang kami harapkan kondisi pertanian di Sumbar bisa kembali pulih pula," jelasnya.

Selain membantu pemulihan lahan, Pemprov Sumbar juga turut mengusulkan adanya perbaikan irigasi, alat pertanian, dan kebutuhan lainnya dalam melakukan pemulihan pertanian yang terdampak bencana alam.

Terpisah, Sekretaris Dinas

Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin menjelaskan bahwa dari data yang dirangkum sejak bencana erupsi Gunung Marapi 3 Desember 2023 hingga bencana banjir lahar dingin pada Mei 2024 ini, terdapat lahan pertanian di sekitar Gunung Marapi yang terdampak.

"Kami telah merangkum data-datanya, bahkan telah kami buatkan proposal kepada Menteri Pertanian tertanggal 13 Maret 2024 sebagai bentuk upaya meminta bantuan ke Mentan terkait penanganan dampak bencana alam terhadap pertanian di Sumbar," jelasnya.

Dia memerinci bahwa dimulai dari bencana 3 Desember 2023—berdasarkan laporan Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota yang terdampak—diperkirakan sekitar 2.158,30 hektare (ha) lahan pertanian di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang yang terdampak oleh abu vulkanik Gunung Marapi.

"Lahan pertanian yang terdampak itu berada di sekitar Gunung Marapi yang juga merupakan sentra produksi tanaman hortikultura terutama sayuran di Sumbar," katanya.

Dia menjelaskan bahwa di wilayah tersebut, komoditas unggulan paling terdampak adalah komoditas tanaman hortikultura, seperti bawang merah dan cabai, serta sejumlah tanaman sayuran lainnya.

"Dari testimoni sejumlah petani, dilaporkan bahwa petani telah mengalami kegagalan penanaman berulang kali karena abu vulkanik tersebut," ujarnya.

DAMPAK
Sementara, pada 7—8 Maret 2024, Sumbar kembali mengalami bencana banjir akibat curah hujan yang sangat tinggi, dan telah menyebabkan

“
Kami memperkirakan pada Juli 2024 itu ketersediaan beras tipis, hanya ada 5.000 ton. Dan jumlah itu hanya cukup untuk 3 hari.

kan sekitar 7.927,34 ha lahan pertanian terdampak.

Lahan pertanian yang terdampak banjir tersebut meluas di Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto.

Menurutnya, untuk komoditas pertanian paling terdampak pada bencana kali ini adalah komoditas tanaman pangan dan hortikultura seperti padi, jagung, bawang merah, dan cabai serta sejumlah tanaman sayuran lainnya.

"Banyak lahan pertanian yang tergenang oleh luapan air sungai dan sebagian dari itu mengalami gagal panen (puso). Banjir bandang juga merusak sejumlah fasilitas pengairan, baik irigasi primer, sekunder, maupun tersier," jelasnya.

Pun demikian dengan bencana banjir lahar dingin yang dibarengi dengan banjir bandang di sejumlah daerah pada 11 Mei 2024.

Hal tersebut juga turut menyebabkan sejumlah lahan pertanian di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan

Kota Padang Panjang terdampak oleh banjir lahar dingin tersebut.

Selain itu, imbuhnya, kejadian banjir pada lahan-lahan pertanian lainnya akibat curah hujan tinggi juga terjadi dalam rentang 11—14 Mei 2024, yang juga turut menyebabkan sejumlah lahan pertanian di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Payakumbuh, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Sawahlunto, terdampak oleh banjir tersebut.

Bahkan, Ferdinal mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan petugas lapangan Balai Perlindungan tanaman Pangan dan hortikultura (BPTPH) Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar, bencana banjir ini telah merusak sejumlah areal pertanaman padi, jagung, cabe, tomat, terong, dan sayuran lainnya.

Untuk itu, imbuhnya, Pemprov Sumbar juga telah mengajukan kebutuhan penanganan dan pemulihan dampak kepada Kementerian Pertanian, yakni untuk padi yang terdampak luasnya 4.416,64 ha dan luas itu turut terjadi puso seluas 725,05 ha.

Adapun, untuk jagung luas lahan yang terdampak mencapai 1.098,28 ha dan mengalami puso 320,45 ha. Kemudian, cabai merah juga turut merasakan dampak bencana dengan luas 155,1 ha dan terjadi 32,38 ha.

Selanjutnya, untuk bawang merah lahan yang terdampak 32,6 ha dan kondisi pertanian yang mengalami puso mencapai 1.180,39 ha," jelasnya.

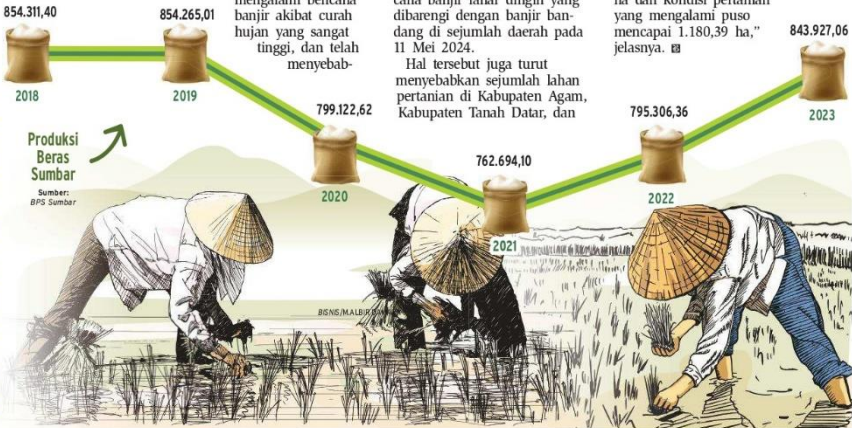
"Jadi, total lahan yang terdampak itu tercatat 5.971,08 ha dan kondisi pertanian yang mengalami puso mencapai 1.180,39 ha," jelasnya.

Sepanjang 2023, Provinsi Sumatra Barat mencatatkan produksi beras mencapai **843.927,06 ton** atau naik tipis sebesar **6,11%** dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 795.306,36 ton.

Wilayah Penghasil Beras Sumatra Barat (ton)

Wilayah	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	803,29	710,48
Kab. Pesisir Selatan	93.592,4	110.830,35
Kab. Solok	103.828,1	105.704,66
Kab. Sijunjung	31.237,81	34.685,61
Kab. Tanah Datar	98.365,01	106.719,14
Kab. Padang Pariaman	78.210,03	80.050,66
Kab. Agam	79.692,89	85.873,92
Kab. Lima Puluh Kota	68.676,9	76.474,75
Kab. Pasaman	83.443,24	82.320,92
Kab. Solok Selatan	28.812,26	31.929,8
Kab. Dharmasraya	27.535,43	24.287,27
Kab. Pasaman Barat	29.134,93	28.462,92
Kota Padang	26.196,06	30.964,32
Kota Solok	8.075,12	9.520,47
Kota Sawahlunto	6.716,86	6.574,92
Kota Padang Panjang	3.351,96	3.183,63
Kota Bukit Tinggi	2.363,98	2.094,34
Kota Payakumbuh	15.763,15	14.216,31
Kota Pariaman	9.506,94	9.322,59

Sumber: BPS Sumbar



Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Pasar Gandum Minim Persaingan	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	14	
Author	Sri Mas Sari	

| IMPOR BIJI-BIJIAN |

Pasar Gandum Minim Persaingan

Bisnis, JAKARTA — Perburuan gandum di pasar global mungkin tidak akan sesengit sebelumnya, mengingat China tengah mengurangi pembelian.

Namun, bagi produsen biji-bijian, ini bisa berarti tekanan terhadap harga jual.

Selera China terhadap gandum dan jagung dari luar negeri berkurang dengan cepat, padahal selama ini dunia sudah terbiasa dengan permintaan yang tinggi dari importir komoditas pertanian terbesar itu.

Dilansir *Bloomberg*, Rabu (12/6), para *buyer* di China belum terlihat melakukan pembelian besar selama beberapa bulan.

Dengan harga biji-bijian domestik yang sangat rendah, tren itu kemungkinan akan terus berlanjut hingga kuartal

III/2024.

Para peramal global seperti International Grains Council dan Departemen Pertanian Amerika Serikat, masih memperkirakan besarnya pembelian oleh China pada tahun ini dan tahun depan.

Jika impor dari China— Pilar utama permintaan—menurun, maka para petani mulai dari Amerika hingga Eropa dan Australia, akan terganggu.

Sikap apatis China terhadap impor beras dari lesunya perekonomian dan panen raya di negara itu yang berturut-turut.

Pemerintah terpaksa menimbun gandum dan jagung untuk mendukung petani lokal, sementara ekspor jagung dibatasi untuk menopang pasar dalam negeri.

“Perekonomian benar-benar buruk, dan permintaan seca-

ra keseluruhan dari seluruh masyarakat merosot,” kata Ma Wenfeng, analis senior di BOABC, sebuah konsultan di Beijing.

Menurut Charles Hart, analis komoditas senior di BMI, sebuah unit Fitch Solutions, kondisi panen yang lebih baik kemungkinan akan membantu mempersempit defisit gandum China dari hampir 17 juta ton pada 2023—2024 menjadi di bawah 7,5 juta ton pada 2024—2025, yang mengakibatkan berkurangnya permintaan impor.

Meskipun situasi ini bisa berbalik dengan cepat, terutama jika cuaca buruk memengaruhi panen, kelebihan pasokan gandum di China sepertinya tidak akan berkurang secara drastis saat konsumsi masih sangat lemah. *(Sri Mas Sari)*

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Airlangga Tawarin Proyek EBT Di Sini	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	10	
Author	NOV	



PEGANG CENDERAMATA:
Menteri Koordinator (Menko)
Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto
(kanan) bersama Menteri
Perdagangan Eurasian
Economic Commission (EEC)
Andrey Slepnev melakukan
pertemuan bilateral di
Moskow, Rusia, Senin
(10/6/2024). Pertemuan itu
membahas isu kerja sama
strategis di bidang ekonomi
dan perdagangan.

Pebisnis Rusia Tertarik Investasi Nuklir Ketenagalistrikan

Airlangga Tawarin Proyek EBT Di Sini

Pemerintah berupaya meningkatkan investasi dan kerja sama ekonomi dengan beberapa negara. Rusia menjadi salah satu negara yang menjadi target dalam upaya tersebut.

UPAYA meningkatkan kerja sama kedua negara ini dilakukan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan melakukan kunjungan kerja dan berbagai pertemuan bilateral ke Moskow, Rusia, pada 10-12 Juni 2024.

Pada hari pertama rangkaian kunjungan kerja, Senin (10/6/2024), Airlangga melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Eurasian Economic Commission (EEC) Andrey Slepnev.

Keduanya membahas isu kerja sama strategis di bidang ekonomi dan perdagangan. Antara lain percepatan penyelesaian Perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA), hingga mendiskusikan

langkah-langkah solutif untuk menghilangkan hambatan perdagangan antara kedua pihak.

Selain itu, membahas isu-isu terkait skema pembayaran dalam perdagangan antarkedua negara.

“Perundingan Indonesia-EAEU FTA diharapkan akan selesai tahun 2024, sehingga bisa bermanfaat bagi para pelaku usaha dan mengembangkan bisnisnya ke kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah,” ungkap Airlangga dalam keterangan resmi Kemenko Perekonomian, Rabu (12/6/2024).

Ketua Umum Partai Golkar itu juga menegaskan bahwa Indonesia terus mendorong peningkatan nilai ekspor minyak sawit ke negara-negara anggota EAEU (Eurasian Economic Union).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Slepnev juga menyampaikan harapan serupa untuk penyelesaian proses perundingan.

Dalam hal ini, EEC (The Eurasian Economic Commission) juga mengharap agar proses perundingan dapat diselesaikan pada Juli 2024 di Indonesia.

“EEC percaya bahwa perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia akan turut memperkuat fondasi kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan lima negara anggota EAEU,” jelas Slepnev.

Terkait *concern* Indonesia mengenai minyak sawit, Slepnev mengatakan, EAEU tidak akan mengambil langkah seperti Uni Eropa yang menerapkan kebijakan diskriminatif kepada komoditi minyak sawit asal Indonesia.

“EAEU mendukung penuh kerja sama kedua negara khususnya di sektor pertanian, termasuk pupuk,” ujanya.

Setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Slepnev, Air-

langga melakukan pertemuan informal dengan Ketua Parlemen Rusia/ State Duma, Vyacheslav Volodin di Gedung State Duma.

Pertemuan ini juga dihadiri anggota parlemen kedua negara yang membahas peningkatan kerja sama antarpemerintah Indonesia dan Rusia.

Di hari yang sama, mantan Menteri Perindustrian itu juga bertemu dengan beberapa pimpinan Perusahaan terkemuka Rusia, yaitu Perusahaan JSC Rosatom yang diwakili First Deputy Chief Executive Officer (CEO) for Corporate Development and International Business, Kiril Komarov.

Pada pertemuan tersebut, kedua pihak melakukan diskusi terkait rencana kerja sama pengembangan energi nuklir untuk ketenagalistrikan, serta keperluan non-energi seperti kesehatan dan pertanian.

Komarov mengatakan, Rosatom memiliki pengalaman yang

cukup panjang untuk melakukan kerja sama yang baik dan komprehensif dengan Indonesia.

“Rosatom akan menyiapkan berbagai hal, bukan hanya konstruksi tapi analisis detail dari segi sosial ekonominya,” jelas Komarov.

Menanggapi hal tersebut, Airlangga menyampaikan saat ini Indonesia sedang fokus beberapa hal terkait energi bersih sebagai bagian dari transisi energi yang sedang diupayakan oleh Pemerintah.

Energi nuklir dapat menjadi salah satu opsi bagi ketersediaan listrik masyarakat Indonesia tanpa harus mengotori lingkungan. Karena itu, kata Airlangga, Rusia juga diundang untuk bekerja sama dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.

“Ini komitmen Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan proses transisi energi yang telah dimulai beberapa tahun lalu,” terang Airlangga. ■ NOV

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Kelapa Parut Kepri Tembus Pasar AS	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	10	
Author	Rakyat Merdeka	

Kelapa Parut Kepri Tembus Pasar AS

KEPULAUAN Riau (Kepri) mengekspor kelapa parut kering atau *dessicated coconut* dan *coconut chips* (keripik kelapa) ke pasar Amerika Serikat (AS).

Ekspor kelapa parut kering dengan jumlah 12,4 ton dan coconut chips sejumlah 5,6 ton ini semakin membuka peluang ekspor, sehingga para petani tak resah lagi akan serapan pasarnya.

Menanam kelapa merupakan investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan, karena dari bunga, buah, daun bahkan batang kelapa semua memiliki nilai jual.

Title	Bulog Jalankan Penugasan Investasi Beras di Kamboja	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	8	
Author	TI	

Bulog Jalankan Penugasan Investasi Beras di Kamboja

JAKARTA, ID—Perum Bulog siap menjalankan penugasan dari pemerintah untuk menjajaki peluang investasi di sektor perberasan dengan Kamboja. Perusahaan pelat merah Indonesia itu telah melakukan pembicaraan awal dengan perbankan nasional terkait peluang investasi tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Bulog mengakuisisi sumber beras di Kamboja guna mengamankan stok cadangan beras negara RI.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti arahan pemerintah terkait pening-

katan kerja sama pangan dengan Kamboja. Bulog siap menjalankan penugasan pemerintah yang telah disampaikan Presiden Jokowi dan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B Pandjaitan terkait kerja sama ekonomi dan investasi pangan, khususnya perberasan, dengan Kamboja. "Kami telah melakukan pembicaraan awal dengan perbankan nasional terkait peluang investasi itu," jelas Bayu dalam keterangannya, Rabu (12/06/2024).

Hal itu menanggapi pernyataan Menko Luhut terkait Bulog yang akan berinvestasi di perusahaan beras di Kamboja saat HUT Hipmi

ke-52, baru-baru ini. Bayu menjelaskan, sejauh ini, Bulog juga sudah melakukan kerja sama perdagangan beras dengan Kamboja, baik dengan skema *business to business* (BtoB) maupun *government to government* (GtoG) di 2023 dan awal 2024. "Pada dasarnya, kami siap melaksanakan penugasan itu. Kami juga telah berkomunikasi dengan Kedubes RI di Phnom Penh dan beberapa pelaku usaha beras di Kamboja dan negara sekitarnya," ujar Bayu.

Dalam menjalankan tugas mengadakan dan menjaga stok, Bulog kini memiliki stok dengan volume ideal 1,8 juta ton. Dalam upaya menjaga stok dengan vol-

ume ideal itu, Bulog terus mendahulukan pengadaan gabah/beras dalam negeri selama musim panen. Hingga pertengahan Juni 2024, Bulog telah menyerap produk petani dalam negeri hampir 700 ribu ton. "Bulog menjaga stok beras dan melaksanakan tugas sebagai penyedia rantai pasok pangan dengan mendahulukan pengadaan domestik," papar Bayu. Saat ini, Bulog tengah fokus dalam upaya penyerapan gabah/beras petani lokal, penyaluran rutin bantuan pangan beras (BFPB), stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), serta persiapan menjelang Iduladha. Bulog kembali mendapat

tambahan penugasan penyaluran BFPB tiga bulan alokasi untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tiap bulannya di seluruh wilayah Indonesia.

Bulog juga melaksanakan tugas pemerintah untuk pengadaan beras dari luar negeri. Bulog mendapat penugasan importasi dengan dikeluarkannya izin impor 3,6 juta ton tahun ini dan telah direalisasikan 2 juta ton melalui 26 pelabuhan di seluruh Indonesia dengan mengutamakan yang di daerah nonsentra produksi. "Pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan utama dan terbesar di RI, salah satu pelabuhan masuknya beras impor.

Dari awal tahun hingga Mei 2024, ada puluhan kapal yang sudah berhasil bongkar di Pelabuhan Tanjung Priok kurang lebih 490 ribu ton beras," tandas Bayu.

Sampai saat ini, pembongkaran berjalan lancar, meski pada Januari-Maret memang ada proses bongkar kapal yang berjalan cukup lama karena curah hujan masih tinggi tapi proses pembongkaran telah diselesaikan. "Beberapa kasus masalah keterlambatan juga sudah diatasi. Sehingga, saat ini, sudah tidak ada antrian kapal beras di Pelabuhan Tanjung Priok maupun antrian truk-truk beras di gudang Jakarta," tutur Bayu. (tl)

Title	ID Food Targetkan Produksi Gula Naik 13%	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	8	
Author	TI	

ID Food Targetkan Produksi Gula Naik 13%

JAKARTA, ID—Holding BUMN Pangan ID Food menargetkan produksi gula tahun ini mencapai 296.447 ton, naik 13% dari 2023 yang sebesar 262.547 ton. Perusahaan pelat merah itu mengandalkan enam pabrik gula (PG) guna memproduksi gula sebesar itu, yakni PG Rejo Agung Baru, PG Krebet Baru, PG Candi Baru, PG Tersana Baru, PG Jatitujuh, dan PG Sindang Laut.

ID Food pada 2024 menargetkan luas areal tebu 55.822 hektare (ha), naik 3% dari 2023 yang seluas 54.210 ha. Tebu yang digiling tahun ini ditargetkan 3.918.414 ton, naik 10% dari 2023 yang hanya 3.563.498 ton. Untuk protas 2024 ditargetkan 70,19 ton per ha atau naik 7% dari 2023 sebesar 65,7 ton per ha. Sedangkan rendemen tebu dipatok 7,57% tahun ini, naik 3% dari 2023 yang sebesar 7,37%. Alhasil, produksi gula ditargetkan 296.447 ton tahun ini, tahun lalu 262.547 ton.

Di sisi lain, ID Food memiliki tiga anak usaha di bidang industri gula dengan total produksi 262 ribu ton per tahun. Yakni, PT PG Rajawali I berlokasi di Jawa Timur dengan kapasitas 16.884 TCD (*ton cane per day*), PT PG Rajawali II di Jawa Barat

dengan kapasitas 8.350 TCD, dan PT PG Candi Baru di Jawa Timur dengan kapasitas 2.740 TCD.

Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto menjelaskan, ID Food secara resmi telah memulai giling tebu 2024 dengan target produksi gula naik 13% dari 2023. “Kami menargetkan produksi gula tahun ini naik 13% menjadi 296.447 ton, kami sudah memulai giling, paling awal adalah PG Rejo Agung Baru pada 14 Mei 2024 yang merupakan PG milik PT PG Rajawali I dengan target produksi 55.087 ton. Masih milik PT PG Rajawali I yakni PG Krebet Baru yang mulai giling 20 Mei 2024 dengan target 130.900 ton,” ungkap Sis saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (10/06/2024).

Selanjutnya, PG Candi Baru yang mulai giling 15 Mei 2024 dengan target produksi 30.600 ton. Lalu, PG milik PT PG Rajawali II, yakni PG Tersana Baru yang mulai giling 27 Mei 2024 dengan target produksi 29.623 ton, PG Jatitujuh mulai 5 Juni 2024 dengan target 39.539 ton, dan PG Sindang Laut yang akan memulai giling 20 Juni 2024 dengan target produksi 12.790 ton. **(tl)**

Title	Tak Hanya UE, AS-Inggris Adang Sawit RI dengan Isu Deforestasi	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	8	
Author	Tri Listiyarini	

Tak Hanya UE, AS-Inggris Adang Sawit RI dengan Isu Deforestasi

JAKARTA, ID–Selain Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (AS) dan Inggris juga berupaya menghambat perdagangan minyak sawit asal Indonesia dengan isu deforestasi. Karena itu, Pemerintah RI melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus meyakinkan UE, AS, Inggris, dan negara-negara konsumen sawit lainnya bahwa laju deforestasi di Tanah Air dalam 10 tahun terakhir telah turun tajam, yakni dari 800 ribu hektare (ha) per tahun menjadi 104 ribu ha per tahun.

Oleh Tri Listiyarini

Dalam paparan KLHK, isu deforestasi dan degradasi lahan telah masuk ranah perdagangan internasional. Hal itu tidak hanya dilakukan negara-negara UE melalui European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR), tapi beberapa negara juga mulai menjajaki dan menerapkan peraturan dengan dasar deforestasi dan degradasi lahan untuk komoditas berbeda-beda. Pertama, EUDR untuk tujuh komoditas, yakni minyak sawit, kayu, karet, kedelai, cokelat, *cattle*, kopi, dan turunannya. Kedua, AS (USA) dengan Forest Act untuk enam komoditas, yakni minyak sawit, *pulp* kayu, karet, kedelai, cokelat, dan kakao. Ketiga, Inggris dengan UK-FRC untuk empat komoditas, yakni minyak sawit, cokelat, serta *beef and leather* (kecuali *dairy*).

Menurut Menteri LHK Siti Nurbaya, kinerja pengendalian laju deforestasi di Indonesia telah berjalan baik. Melalui berbagai usaha serta bimbingan, supervisi, dan pengawasan yang kuat, terutama dari Komisi IV DPR, penurunan laju de-

forestasi sukses dilakukan. Meski begitu, deforestasi masih menjadi isu dalam perdagangan internasional beberapa komoditas strategis Indonesia, di antaranya minyak sawit. "Karenanya, yang kami lakukan adalah meyakinkan kepada luar (UE, AS, Inggris) bahwa pengendalian deforestasi di Indonesia sudah sangat membaik. Dalam 10 tahun terakhir, pada tahun 2000 itu kira-kira 800 ribu ha sampai 1 juta ha (per tahun), sekarang tinggal 104-120 ribu ha (per tahun), dan ini terus kita perbaiki. Di 2022 kira-kira 104 ribu ha (per tahun), 2023 sekitar 120 ribuan, itu karena ada El Nino," papar Menteri Siti.

Ketua Komisi IV DPR Sudin menyatakan, EUDR merupakan kebijakan diskriminatif, terutama karena harga minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) lebih murah dari minyak nabati lain yang dihasilkan UE, seperti minyak bunga matahari, jagung, kedelai, dan lain-lain. "Mereka (UE) merasa terganggu karena harga CPO sangat murah. Ekspor sawit Indonesia ke China itu cukup besar, di sana tidak untuk memasak tapi membuat kue, dan mereka tidak ada protes. Kalau UE itu ada minyak zaitun, bunga matahari, jagung, kedelai, dan



lain-lain, harganya dibandingkan CPO bisa 1:3 atau 1:4. Jadi, kalau CPO terus masuk ke sana (UE) ya mereka makin kencang protesnya, ini hanya masalah (persaingan) dagang sebetulnya," ujar Sudin.

Menolak EUDR

Menteri Siti Nurbaya, saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (12/06/2024), mengatakan, khusus EUDR, Indonesia hingga kini dalam posisi masih belum bisa menerima regulasi yang cenderung diskriminatif bagi RI tersebut. Koordinasi dalam menuntaskan EUDR dipimpin langsung Kemenko Perekonomian dan KLHK mendukung penuh langkah-langkah yang ditempuh. "Kami terus ikuti perkembangan EUDR dan mendukung Kemenko Perekonomian dalam

mengoordinasikan penanganan EUDR. Dari aspek KLHK, kami melakukan analisa pengecekan lapangan (*ground check*), berkoordinasi dengan kementerian penghasil komoditas terdampak, mengintegrasikan sistem informasi *traceability* dan *geolocation* serta teknis *roadmap*, dan lain-lain," ungkap dia.

Salah satu klausul yang diatur EUDR adalah ketertelusuran (*traceability*), artinya komoditas yang ditanam atau berasal dari hutan akan dipersoalkan UE. Berangkat dari poin *traceability* itu, KLHK mencoba meyakinkan UE bahwa komoditas-komoditas sasaran EUDR diusahakan Indonesia melalui skema *agroforestry* atau bukan dari usaha ilegal. "Contoh, kopi, cokelat, dan karet, diusahakan oleh masyarakat, kita coba

yakinkan itu ditanam di hutan dalam *agroforestry*. Pun dengan sawit, sudah ditangani dan sejak 2018 sampai sekarang masih kita selesaikan. Tugas KLHK adalah meyakinkan bahwa komoditas-komoditas sasaran EUDR yang dihasilkan Indonesia itu harusnya bukan dipersoalkan dari sisi *traceability* dan dianggap sebagai sesuatu yang ilegal karena dari hutan," tutur Menteri Siti.

Mengutip pernyataan Profesor Matthew Hansen dari University of Maryland pada Mei 2024 di Forum PBB untuk Kehutanan (United Nation Forum on Forest/UNFF), sejak 2015, rerata laju deforestasi Indonesia hanya 0,29 juta ha per tahun atau di bawah periode 2000-2015 sebesar 0,86 juta ha per tahun. "Profesor Hansen adalah ahli deforestasi, angka deforestasi Indonesia semakin menurun dari rata-ratanya. Ini yang diharapkan bisa memberi keyakinan (terkait isu deforestasi)," ujar Menteri Siti.

Koreksi Peta Hutan

Sebelumnya, Plt Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK Agus Justianto mengatakan, Pemerintah RI siap melakukan misi diplomasi guna mengoreksi peta hutan acuan UE dalam pelaksanaan EUDR karena dari

hasil pencermatan ditemukan ada persoalan akurasi di peta itu. Diplomasi itu dilakukan melalui Kedubes RI untuk UE di Brussels, Belgia. UE telah meluncurkan peta hutan dunia (Global Forest Map/GFM) 2020 sebagai acuan implementasi EUDR pada platform European Union Forest Observatory (EUFO). "Langkah diplomasi lain juga dilakukan, baik jalur bilateral maupun multilateral," jelas Agus.

Dari pencermatan membandingkan Peta Tematik GFM dengan Peta Tematik SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional) KLHK, terungkap ada persoalan akurasi di GFM UE, di antaranya *over* estimasiutupan hutan. Agus menjelaskan, objek yang diidentifikasi sebagai hutan oleh GFM UE ternyata kondisi lapangannya tidak seluruhnya hutan, tapi antara lain berupa semak belukar, pertanian, perkebunan, penutupan lahan lainnya, dan tubuh air. Contoh, peta GFM UE menunjukkan adautupan hutan pada tubuh air Danau Rawa Pening, Jawa Tengah, atau adautupan hutan di ruas jalan di DKI Jakarta. Peta GFM UE juga menunjukkan adautupan hutan padahal lahan di lokasi tersebut berupa lahan baku sawah.

Title	Panen Kopi Arabika Yellow Caturra	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	8	
Author	Ant	



ANT

Panen Kopi Arabika Yellow Caturra

Seorang petani memetik kopi arabika jenis Yellow Caturra (kulit biji kopi berwarna kuning) di Desa Sumberwringin, Bondowoso, Jawa Timur, Rabu (12/6/2024). Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2016 dikenal sebagai "Bondowoso Republik Kopi" karena sebagian besar perkebunannya ditanami kopi, salah satunya kopi arabika berkulit kuning, yang dijual cherry biji kopi/gelondongan dengan harga Rp20.000 perkilogram.

Tittle	Pembagian Daging Kurban Harus Sampai ke Pelosok	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	11	
Author	Ed	

Pembagian Daging Kurban Harus Sampai ke Pelosok

JAKARTA, ID – Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menilai besarnya potensi daging yang bisa dihasilkan dalam pelaksanaan ibadah kurban berpeluang untuk memperbaiki tingkat gizi dan kesehatan masyarakat, terutama kelompok termiskin.

Namun, potensi kurban terdistribusi amat tidak merata, kesenjangan yang lebar terjadi antara daerah metropolitan utama Jawa dengan wilayah lainnya.

IDEAS mengidentifikasi sejumlah daerah prioritas intervensi gizi protein hewani melalui kurban, yaitu daerah dengan konsumsi daging yang sangat rendah, mendekati nol, dan dengan jumlah orang termiskin (*mustahik*) yang besar.

"Daerah-daerah prioritas intervensi gizi melalui kurban ini didominasi oleh daerah luar Jawa dengan karakteristik umum adalah daerah tertinggal dan terisolasi, seperti Kabupaten Majene, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan," kata Haryo Mo-jopahit, peneliti IDEAS dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/6/2024).

Haryo menambahkan, terdapat beberapa daerah di Jawa yang masuk dalam kategori daerah prioritas intervensi gizi melalui kurban ini seperti Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.

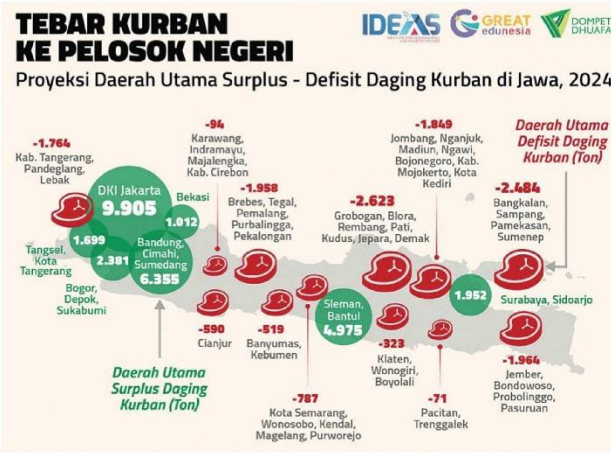
Padahal daerah-daerah tersebut dekat dengan kota-kota besar.

Dari simulasi IDEAS terlihat bahwa daerah dengan potensi surplus kurban terbesar didominasi daerah metropolitan Jawa, seperti Jakarta (9.905 ton) serta Bandung Raya yaitu Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Sumedang (6.355 ton).

"Daerah surplus kurban terbesar lainnya adalah Sleman dan Bantul (4.975 ton), Bogor, Depok, dan Sukabumi (2.381 ton), Surabaya dan Sidoarjo (1.952 ton), Tangerang Selatan dan Kota Tangerang (1.699 ton) dan Bekasi (1.012 ton)," ujar Haryo.

Sementara itu, wilayah dengan potensi defisit kurban terbesar didominasi daerah pedesaan Jawa, IDEAS mengelompokkannya berdasarkan kedekatan secara geografisnya. Wilayah tersebut yaitu pertama Kab. Grobogan, Blora, Pati, Jepara, dan Demak (-2.623 ton), kedua kawasan utara Jawa Timur, yaitu Kab. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep (-2.484 ton), ketiga kawasan timur Jawa Timur yaitu Kab. Jember, Bondowoso, Probolinggo, dan Pasuruan (-1.964 ton).

Keempat kawasan utara Jawa Tengah yaitu Kab. Brebes, Tegal, Pemalang, Purbalingga, dan Pekalongan (-1.958 ton), kelima kab. Jombang, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Kab. Mojokerto, dan Kota Kediri (-1.849 ton), keenam kab. Tangerang,



Pandeglang, dan Lebak (-1.764 ton).

Selanjutnya ketujuh Kab. Banyumas dan Kebumen (-519 ton), kedelapan wilayah selatan Jawa Barat yaitu Kab. Cianjur (-590 ton), dan kesembilan kawasan utara Jawa Barat yaitu Kab. Karawang, Indramayu, Majalengka, dan Kab. Cirebon (-94 ton).

"Kemiskinan Jawa yang sangat masif menuntut kemam-

puan identifikasi mustahik yang sempurna bagi pengelola hewan kurban. Sedangkan, kemiskinan luar Jawa menuntut kemampuan membuka akses keterpencilan dan keterisolasi yang kuat," tutur Haryo.

Tantangan pengelolaan kurban Indonesia secara umum masih terdesentralisasi di ribuan panitia kurban lokal temporer yang tersebar di seluruh negeri, berbasis masjid, musholla,

pesantren, hingga lembaga pendidikan dan perusahaan.

Tidak meratanya potensi kurban ini mencerminkan kesenjangan pendapatan antarwilayah yang akut di Indonesia. Untuk intervensi daging bagi kelompok termiskin, maka dibutuhkan reformasi berupa kolaborasi kegiatan kurban.

"Program distribusi hewan kurban dari daerah surplus ke daerah minus daging kurban

sangatlah tepat dan penting untuk penyaluran kurban yang tepat sasaran dan signifikan untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan si miskin," kata Haryo.

Mengambil studi kasus program tebar hewan kurban dari LAZ Dompot Dhuafa (THK-DD), rekayasa sosial terbukti mampu meningkatkan pemanfaatan kurban secara signifikan.

"Pada 2023, dari ribuan titik distribusi program THK-DD di penjuru negeri, kami menemukan bahwa daerah distribusi secara umum adalah daerah dengan rerata konsumsi daging yang sangat rendah, bahkan mendekati nol," ungkap Haryo.

Haryo memberi contoh di Jawa, daerah distribusi kurban program THK-DD seperti di Kab. Ngawi dengan rerata konsumsi daging 0,01 kg/kapita/tahun, Kab. Magelang (0,18 kg/kapita/tahun), dan Kab. Pandeglang (0,06 kg/kapita/tahun).

Sedangkan di luar Jawa, daerah distribusi program THK-DD seperti di Kab. Seram Bagian Barat dengan rerata konsumsi daging hanya 0,01 kg/kapita/tahun, Kab. Kubu Raya (0,08 kg/kapita/tahun), Kab. Sigi (0,16 kg/kapita/tahun), dan Kab. Halmahera Utara (0,11 kg/kapita/tahun).

"Dengan demikian, program Tebar Hewan Kurban adalah tepat sasaran dan efektif meningkatkan konsumsi daging mustahik," tutur Haryo. (ed)

Title	Refocusing Anggaran Pertanian Hadapi El nino	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	7	
Author	Ant	



Antara

Refocusing Anggaran Pertanian Hadapi El nino

Sejumlah petani menanam padi di areal sawah desa Sindang, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (12/6/2024). Kementerian Pertanian memfokuskan kembali atau refocusing anggaran senilai Rp7 triliun untuk membantu petani menghadapi El Nino dan kemarau atau kekeringan di tiga bulan masa kritis periode Agustus hingga Oktober 2024.

Title	Bangkitkan Kembali Lada Bangka Belitung	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	5	
Author	Stephanus Aranditio	

JALUR REMPAH

Bangkitkan Kembali Lada Bangka Belitung

Di tengah godaan komoditas tanaman keras seperti karet dan sawit serta komoditas tambang timah, para petani lada di Belitung Timur tetap bertahan menanam rempah. Mereka memiliki secercah harapan agar sejarah kejayaan lada di pulau jalur rempah ini kembali terulang.

Badan Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat, ekspor lada putih tahun 2023 mencapai 4.000 ton, naik dibandingkan pada 2022 yang sebanyak 3.600 ton. Adapun secara nasional, ekspor lada putih menurun setiap tahunnya hingga terakhir tercatat 12.944 ton pada 2022.

Produksi lada kini masih jauh dari catatan sejarah ekspor yang pernah mencapai 80.000 ton pada abad ke-16 atau pra-Indonesia.

Sejarawan dari Universitas Sriwijaya, Dedi Irwanto Muhammad Santun (51), mengatakan, pada era Kerajaan Balok (abad ke-16), lada dari petani langsung dibeli oleh kerajaan dengan harga mahal. Kerajaan hanya mengambil keuntungan dari kurs di pasar global.

"Satu kampil lada atau sahang dulu itu 10.000 pitis, itu mahal di masyarakat sehingga banyak yang menanam lada. Sultan menjualnya langsung ke pedagang asing, yakni Portugis dan Inggris, dengan mata uang real (Spanyol)," kata Dedi saat ditemui di Belitung Timur, Selasa (11/6/2024).

Sementara, saat ini, luas perkebunan lada di Bangka Belitung terus menyusut dalam 25 tahun terakhir. Pada 1990-an, luas perkebunan lada di Bangka Belitung masih 90.000 hektar. Memasuki 2002-2003, luas lahan itu menyusut menjadi sekitar 60.000 hektar. Pada 2008, luas lahan itu kembali menyusut menjadi lebih kurang 33.000 hektar.

Sempat ada penambahan luas lahan menjadi 44.494,56

Kita kehilangan memori kolektif, lada kita kian terpuruk saat pasar global sedang bergairah.

Dedi Irwanto

hektar pada 2012. Sepuluh tahun kemudian atau pada 2022, luas lahan hanya bertambah menjadi 53,44 hektar. Ekspansi tambang timah diduga menjadi salah satu pemicunya (Kompas.id, 25 April 2024).

Dedi menyayangkan hal tersebut. Bangka Belitung yang dahulu dikenal sebagai pulau yang kaya dengan lada berubah menjadi pulau timah. Lada Bangka Belitung bahkan telah memiliki sertifikat indikasi geografis (SIG) yang diakui dunia, yaitu Muntok White Pepper. Dengan begitu, lada yang ada pada label tersebut dapat dipastikan sebagai lada yang berasal dari tanah perkebunan petani Bangka Belitung.

"Kita kehilangan memori kolektif, lada kita kian terpuruk saat pasar global sedang bergairah. Timah dan komoditas (lain) boleh, tetapi jangan lupakan tanaman kita yang sudah mulai langka ini," ucapnya.

Ingin tetap menanam

Dulhadi (44), Ketua Kelompok Tani Bina Lestari II, Desa Lintang, Kecamatan Gantung, Belitung Timur, mengungkapkan, saat ini petani lada kian terpuruk karena harga pasar global yang tak mampu mereka kendalikan. Padahal, mereka tetap ingin menanam lada demi menjaga Bangka Belitung sebagai pulau rempah.

Namun, upaya mereka tersebut menghadapi tantangan karena harga pupuk yang mahal. Terlebih sejak Kementerian Pertanian membatasi kuota pupuk subsidi hanya untuk 9 komoditas pertanian, tidak

termasuk lada. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 memerintahkan alokasi pupuk bersubsidi untuk subsektor perkebunan hanya diberikan kepada petani kakao, kopi, dan tebu.

"Kalau dulu pupuk subsidi, untuk urea itu seharga Rp 100.000-Rp 120.000 (per karung isi 50 kilogram). Sekarang, tanpa subsidi, harga urea bisa mencapai Rp 400.000-an. Belum lagi harga NPK, bisa Rp 500.000 lebih. Itu yang susah kami kendalikan," tutur Dulhadi.

Selain itu, mereka juga menghadapi tantangan harga pasar yang tak bisa mereka kendalikan. Saat ini, harga lada di tengkulak masih cukup tinggi, yakni Rp 120.000 per kilogram. Namun, harga ini baru naik setelah beberapa tahun stagnan di angka Rp 50.000 per kg.

Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengajak anak muda untuk ikut berlayar dengan kapal layar KRI Dewaruci dalam program Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024. Tahun ini, pelayaran dilakukan selama 38 hari mulai dari 7 Juni sampai 17 Juli 2024.

Tujuh titik yang dituju dalam pelayaran ini adalah Dumai, Jakarta, Belitung Timur, Jambi, Sabang, Malaka, Tanjung Uban, dan Lampung. Sebanyak 75 laskar rempah yang diseleksi dari masyarakat umum bersama peserta lainnya, yakni peneliti, pewarta, serta pegiat film dan foto, telah dipilih untuk turut melihat titik-titik sejarah jalur perdagangan dan budaya rempah.

Setelah tiga hari menjelajahi Kabupaten Belitung Timur, para laskar rempah bersama kapal layar KRI Dewaruci melanjutkan Muhibah Budaya Jalur Rempah ke Kota Dumai, Provinsi Riau, Rabu (12/6). Pelayaran diperkirakan membutuhkan waktu empat hari.

• (STEPHANUS ARANDITIO)

Tittle	El Nino dan Kegagalan Impor Meredam Gejolak Harga Beras
Date	13 Juni 2024
Media	Kompas
Page	13
Author	Johanes Galuh Bimantara/Melati Mewangi/Faja Ramadhan/Stefanus Ato/Harry Susilo



El Nino dan Kegagalan Impor Meredam Gejolak Harga Beras

Impor beras jadi jalan pintas yang dipilih pemerintah kala menghadapi penurunan produksi padi, seperti tecermin dari kejadian El Nino 2023 dan 2015, serta kekeringan pada 2006. Namun, kebijakan impor seakan mengalami kegagalan berulang melawan gejolak harga beras di pasaran.

Johanes Galuh Bimantara/Melati Mewangi/
Faja Ramadhan/Stefanus Ato/Harry Susilo

Meskipun pemerintah acap kali meyakinkan stok beras aman, lonjakan harga beras yang biasanya terjadi di akhir tahun hingga awal tahun berikutnya seolah menunjukkan kondisi sebaliknya. Pemerintah seakan tak kuasa menstabilkan harga.

Ketika terjadi El Nino pada 2023 silam, ada sejumlah kebijakan terkait impor beras. Tahun itu, Bulog sudah mengimpor beras dengan mempertimbangkan penurunan produksi gabah akibat El Nino. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia mengimpor 306 juta ton beras sepanjang 2023, melampaui 613,61 persen dibanding pada 2022 (429.000 ton). Berdasarkan penghitungan Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa, impor beras 2023 merupakan yang tertinggi dalam rentang waktu 25 tahun terakhir.

Pemerintah juga memutuskan kuota impor beras 2 juta ton untuk tahun 2024 berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 7 Desember 2023. Tak cukup di situ, pada Februari 2024 pemerintah menambah kuota impor beras untuk tahun 2024 menjadi 3,6 juta ton yang dilaksanakan Bulog dengan mempertimbangkan penurunan produksi padi akibat El Nino.

Namun, tetap saja kebijakan impor itu tak berakibat terhadap kenaikan harga beras. Pada akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024, harga beras melonjak tajam. Pada Oktober 2023, harga beras medium menjadi Rp 13.852 per kg, lebih tinggi dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zona kisaran Rp 10.900 per kg-Rp 11.800 per kg. Bulog berupaya menurunkan harga dengan melepas beras ke pasar induk sebanyak 23.559 ton. (Kompas, 24/10/2023).

Nyatanya, hingga awal tahun 2024, harga beras masih tinggi. Dikutip dari berita Kompas pada 13 Februari 2024, Presiden Jokowi yang menggelar rapat terbatas perberasan nasional memberikan arahan agar membangun harga yang beredar di pasaran tetap ada.

Pola yang sama

Soal strategi dalam impor beras, pemerintah seperti tidak belajar dari kejadian El Nino tahun 2015 dan kekeringan 2006. Pola yang sama terjadi dalam menyikapi El Nino. Harian Kompas merekam perjalanan kegagalan itu.

Terkait kekeringan yang terjadi pada 2006, pemerintah berencana mengimpor beras seperti tertuang dalam surat Menko Kesra Aburizal Bakrie

kepada Presiden tertanggal 28 Februari 2007 Nomor B.32/Menko/Kesra/II/2007 perihal Laporan Pelaksanaan Impor Beras. Saat ini, stok Bulog diperkirakan terkuras untuk kebijakan percepatan beras bagi rakyat miskin, operasi pasar beras tanpa batas, serta berbagai bencana alam yang terjadi (Kompas, 8/3/2007).

Kala itu, stok beras Bulog rata-rata 1,6 juta ton. Idealnya stok dianggap aman jika ada 2 juta ton beras. Alhasil, impor beras asal Vietnam dan Thailand dengan total 1,5 juta ton dilakukan. Adapun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan penyerapan beras hingga akhir 2007 adalah 2 juta ton.

Kenaikan harga beras pada akhir 2006 hingga awal 2007 dipicu oleh musim kemarau panjang yang menyebabkan lahan sawah kekeringan. Operasi pasar menggunakan beras impor juga dilakukan untuk menekan harga.

Namun, hasil operasi pasar itu tidak signifikan menurunkan harga beras. Kenaikan harga masih berlangsung hingga Agustus 2007. Dengan demikian, Bulog dinilai gagal untuk menurunkan harga karena minim stok, mekanisme operasi pasar, minim penyerapan beras operasi pasar oleh konsumen, dan suplai tidak stabil (Kompas, 16/3/2007).

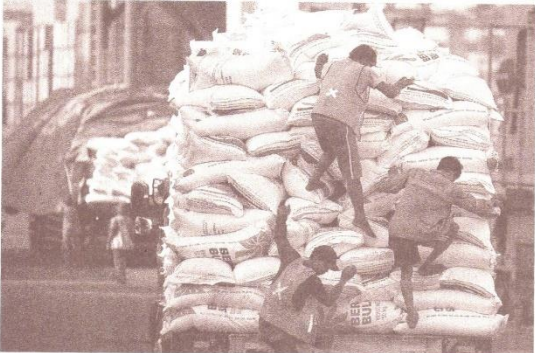
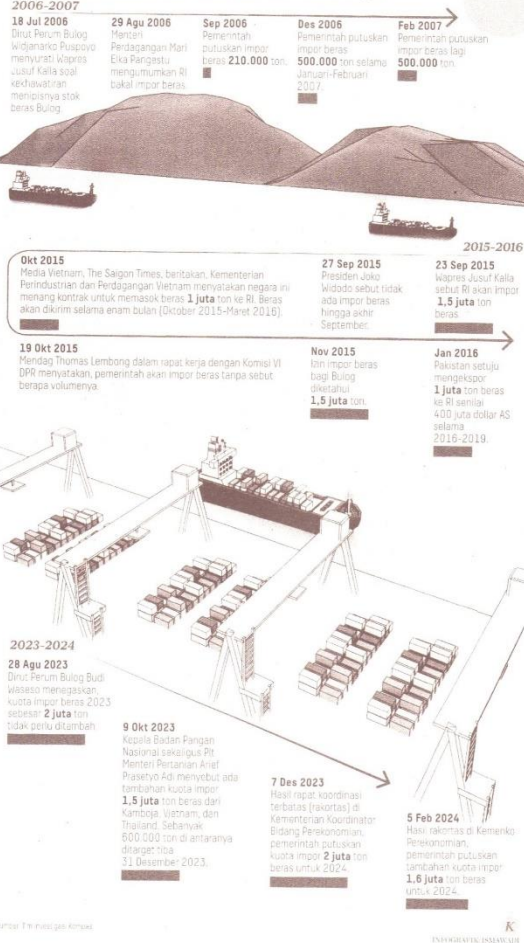
Adapun akibat El Nino pada 2015, Presiden Joko Widodo pada 27 September 2015 sempat menyatakan, tidak ada impor beras sampai akhir September. Apabila, BPS memprediksi bakal ada surplus beras dari produksi padi tahun itu.

Namun, media Vietnam, The Saigon Times, keburu memboreskan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan negara tersebut menyatakan Vietnam menang kontrak untuk memasok beras 1 juta ton ke Indonesia. Beras akan dikirim selama enam bulan, mulai Oktober 2015 hingga Maret 2016 (Kompas, 10/10/2015).

Pemerintah akhirnya mengizinkan Bulog mengimpor 1,5 juta ton beras dari Vietnam dan Thailand. Itu pun belum sanggup membuat harga beras terkendali. Akhirnya, pada Januari 2016 tersiar kabar bahwa Pakistan setuju mengekspor 1 juta ton beras ke RI senilai 400 juta dolar AS selama 2016-2019 (Kompas, 9/1/2016). Kala itu, stok beras Bulog ada sebanyak 1,2 juta ton.

Terkait strategi perberasan

Perjalanan Kebijakan Impor Beras Saat El Nino/Kekeringan



Buruh turun dari truk setelah memindahkan beras yang didatangkan dari Vietnam dengan menggunakan kapal barang MP Fortune di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (21/3/2024). Menurut keterangan pekerja, kapal tersebut mengangkut 27.000 ton beras. Pemerintah menetapkan kuota impor beras untuk tahun 2024 sebanyak 3,6 juta ton.

LIPUTAN KHUSUS

2015 ke 2016, Andreas pernah menulis, sejak awal 2015 hingga awal 2016 harga pangan meningkat tinggi justru di tengah inflasi yang cukup rendah (3,35 persen). Kala itu, rata-rata harga beras medium nasional melonjak 13,2 persen atau hampir empat kali inflasi.

Jendela waktu

Untuk pengendalian harga beras dengan mempertimbangkan El Nino, yang terlewat dalam kebijakan impor yaitu ketepatan waktu berlandaskan penghitungan kebutuhan konsumsi guna mencukupi permintaan beras sampai panen raya tiba. Ini diutarakan Ketua

Umum Perhimpunan Pengendalian Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso saat dijumpai pada pertengahan April 2024.

Sutarto meminta pemerintah dan para pemangku kepentingan menuntaskan perdebatan dan mengambil keputusan terkait impor beras antara Juni-Juli guna menghindari gejolak harga seperti yang terjadi pada akhir 2023-awal 2024.

Keputusan final impor antara Juni-Juli ini supaya tidak ada impor yang mendekati atau bersamaan dengan panen raya padi. Untuk 2024, panen raya berlangsung pada Maret-Mei. Dengan memperkirakan waktu panen raya, beras impor diharapkan tidak membanting pasar bersamaan dengan beras lokal sehingga harga gabah petani tidak jatuh.

Ketika dikonfirmasi terkait

kebijakan impor beras pemerintah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor beras dilakukan supaya cadangan beras pemerintah tetap aman. Sebab, produksi beras yang rendah akan diikuti kenaikan harga beras.

"Januari dan Februari 2024 (beras) kita defisitnya 2,8 juta ton. Nah, kalau cadangan pangan kita di bawah 1 juta ton, bahaya enggak. Apalagi Januari-Februari kemarin kekurangan 2,8 (juta ton)," kata Arief saat ditemui di Jakarta.

Kebijakan impor beras yang tak kuasa meredakan kenaikan harga beras itu membuat petani gelisah. "Gini nasib petani, ya? Gabah dihargai murah saat panen raya. Ada impor beras dan bantuan beras pasar murah juga," ucap Yanto, petani di Ngawi, Jawa Timur, Maret 2024.

Tittle	Harga Kopi Pecah Rekor, Waktunya Benahi Tata Kelola	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	11	
Author	Adrian Fajriansyah/Emanuel Edi Saputra	

KOMODITAS PERKEBUNAN

Harga Kopi Pecah Rekor, Waktunya Benahi Tata Kelola

A kibat pasokan kopi asal Brasil dan Vietnam menurun, permintaan kopi robusta Nusantara melonjak pada masa panen kali ini. Har- ganya pun melambung, bahkan mencapai titik tertinggi sebelumnya. Kondisi ini dinilai jadi momentum membenahi tata kelola komoditas kopi Ta- nah Air agar semakin diakui dunia.

Sejumlah petani kopi di Kota Pagaralam, Kabupaten Mu- aranenim, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumsel, Rabu (12/6/2024), me- nyatakan, harga kopi robusta membubung tinggi. Biji kopi petik merah laku dijual Rp 100.000-120.000 per kilogram (kg). Menurut mereka, angka ini merupakan rekor tertinggi harga robusta di wilayahnya. Adapun biji dari buah campur asalan (tidak semua petik me- rah) berkisar Rp 70.000-Rp 72.000 per kg, harga tertinggi untuk kelas asalan.

Kenaikan harga biji kopi di- sambut gembira oleh para pe- tani. Pasalnya, kenaikan itu mencapai dua kali lipat diban- dingkan pada tahun lalu. Harga kopi robusta asalan tahun lalu hanya berkisar Rp 30.000- Rp 40.000 per kg, sementara biji kopi petik merah masih se- kitar Rp 45.000 per kg.

Sementara harga kopi jenis arabika saat ini cenderung sta- bil, yakni yang asalan kurang lebih Rp 80.000 per kg dan petik merah Rp 120.000-Rp

130.000 per kg. "Harga kopi robusta saat ini menembus re- kor tertinggi sepanjang sejar- rah," kata Ketan Dewan Kopi Indonesia Sumsel Zain Ismed.

Tingginya harga biji kopi membawa berkah bagi petani. Namun, di sisi lain, fenomena ini bisa menjadi pisau bermata dua. Euforia dapat memacu pe- tani yang ingin mendapatkan uang cepat untuk petik asalan. Hal ini berisiko terhadap citra kopi Sumsel. Kalau kualitas di- abaikan, kopi Sumsel bakal tetap dinilai buruk oleh pem- beli. "Risikonya, Sumsel akan tetap dikenal sebagai penghasil kopi asalan," ujarnya.

Zain mengingatkan petani dan pemerintah agar berha- ti-hati dalam menyikapi feno- mena membubungnya harga kopi saat ini. Petani harus tetap mengutamakan kualitas panen guna menjaga keperca- yaan pembeli. Pemerintah pun tidak boleh lepas tangan untuk meningkatkan dan memberda- yakan petani.

Apalagi, Pemerintah Provin- si Sumsel dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumsel berniat mengangkat merek da- gang kopi Sumsel. Itu dilatar- belakangi oleh kontrolisasi na- sional kopi Sumsel. Merujuk data "Produksi Kopi Menurut Pro- vinsi 2022" yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 30 No- vember 2023, Sumsel adalah produsen kopi terbesar di In- donesia dengan produksi 208.007 ton atau setara 26,85

persen dari total produksi na- sional sebesar 774.096 ton.

Sumsel juga berstatus seba- gai provinsi dengan lahan kopi terluas di Indonesia yang mencapai 267.025 hektar dari total luas lahan kopi nasional yang sekitar 1,26 juta hektar. Namun, selama ini, kopi Sum- sel kalah pamor dibandingkan dengan kopi-kopi lain di In- donesia, seperti kopi dari Aceh, Sumatera Utara, dan Lampung.

Punya potensi

Pemilik merek dagang Kopi Benua di Palembang yang bi- asa menerima kopi dari petani di Muaraenim, Jono Darma Putra, mengatakan, sejatinya kopi Sumsel punya peluang menembus pasar internasio- nal. Buktinya, Kopi Benua dua kali berkesempatan ikut fes- tival di luar negeri, yakni di Korea Selatan baru-baru ini dan sebelumnya di Jepang.

Akan tetapi, untuk bisa eks- por secara konsisten, Kopi Be- nua belum mampu. Hal itu ka- rena tingginya persyaratan eks- por, terutama ke Jepang. Paling tidak, pasar dunia hanya ingin menerima kopi yang dihasilkan dari perkebunan yang ramah lingkungan, panen petik merah, dan pengelolaan pascapanen dengan standar tinggi.

Faktanya, petani di Sumsel masih terbiasa dengan pola perkebunan tradisional yang diwariskan secara turun-temu- run. Mereka cenderung lebih

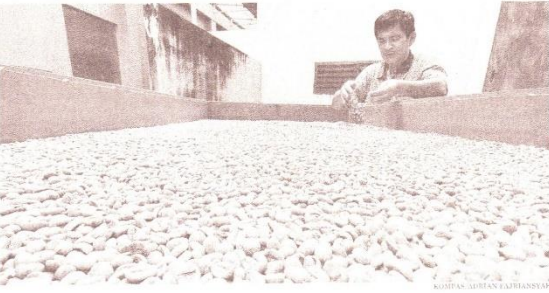
menikmati hasil dari panen asalan. Tak sedikit petani yang menerapkan pengelolaan pas- capanen tradisional, seperti menjemur biji kopi di aspal.

Jono Darma menyatakan, pihaknya berusaha menjaga kualitas demi menembus pasar internasional. Sudah ada pe- tani mitra yang bisa memenu- hi standar-standar itu. Nam- un, suplai dari mereka san- gat terbatas. "Padahal, untuk ekspor, kita mesti konsisten dalam memenuhi permintaan negara tujuan," ujarnya.

Petani kopi asal Pagaralam, Novian Fazli (30), menutur- kan, petani bukannya tak mau menjaga kualitas panen de- ngan petik merah. Namun, mekanisme pasar di Sumsel belum menguntungkan petani.

Sejauh ini, penjualan kopi di Sumsel bergantung perminta- an tauke yang berafiliasi de- ngan pabrik besar di Lampung. Itu karena belum ada industri kopi di Sumsel. Sistem jual-be- linya borongan dan petani su- dah dapat uang dari tauke jauh sebelum panen. Dengan demik- ian, panen asalan atau petik merah tak berpengaruh pada pendapatan petani.

Pada kurun 2018-2019, se- jumlah petani di Pagaralam, termasuk Novian, berinisiatif fokus memproduksi buah petik merah. Faktanya, mereka ju- stu kesulitan menjualnya. Hal itu karena tauke tak terlu- a mementingkan kualitas dan permintaan kopi petik merah



Pemilik merek dagang Kopi Benua, Jono Darma Putra, menunjukkan biji kopi arabika asal Semendo, Kabupaten Muaraenim, Sumatera Selatan, di pabriknya di Palembang, Sumsel, Selasa (11/6/2024). Panen kali ini menjadi berkah bagi petani. Hal itu karena harga jual biji kopi di tingkat petani meningkat hingga dua-tiga kali lipat dibandingkan pada tahun lalu.

hanya dari beberapa kafe di Pagaralam dan Palembang. Dampaknya, petani setengah mati menghabiskan stok kopi petik merah itu. Bahkan, me- reka rela menurunkan harga ju- al agar kopi tersebut tidak lama tersimpan di gudang. Sejak itu, mereka kapok mengejar kua- litas kecuali untuk kebutuhan warung kopi atau kafe pribadi.

"Sekitar 3-4 tahun lalu, pe- merintah mendatangkan calon pembeli dari luar ke Pagaralam. Namun, setelah itu tidak ada lagi calon pembeli yang datang atau didatangkan. Ujungnya, kami tetap disuruh berjuang sendiri," kata Novian.

Petani kopi asal OKU Se- latan, Marlio Andriansyah (37), mengutarakan, butuh komit-

men kuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas kopi Sumsel. Kalau betul punya ni- at, semangat pemerintah ja- ngan sebatas seremoni dan cu- ma memperhatikan hilir.

Selain di Sumsel, kenaikan harga juga dinikmati petani di Kalimantan Barat. Pemilik ke- bun dan rumah produksi kopi di Desa Punggor Kecil, Keca- matan Sungai Kakap, Kabupa- ten Kubu Raya, Kalbar, Budi- ansyah, menyatakan, harga jual kopi di tingkat petani mening- kat. Harga kopi robusta di tingkat petani di desanya naik dari Rp 30.000 per kg menjadi Rp 70.000 per kg.

Tingginya harga kopi mem- buat masyarakat beramai-ra- mai ingin membuka lahan un-

tuk menanam kopi. Budian- syah memanfaatkan kondisi itu dengan menjual bibit kopi.

Selain jenis robusta, kopi je- nis liberika di Kalbar juga me- lonjak harganya. Dede Pur- wansyah, pengelola Pondok Li- terasi Kopi di Kawasan Rusu- nowa Untan, menuturkan, har- ga biji kopi mentah yang bi- asanya Rp 35.000 per kg kini Rp 70.000 per kg di petani.

Lonjakan tinggi harga kopi barangkali tak akan selamanya. Namun, hal yang dia nilai mendesak dilakukan adalah memperbaiki tata kelola kopi, dari hulu hingga hilir. Ada se- deret kendala yang mesti di- atasi bersama.

(ADRIAN FAJRIANSYAH/
EMANUEL EDI SAPUTRA)

Tittle	Kisah Miris Petani di Negeri Agraris	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	2	
Author	Kompas	

IRANI PERTANIAN

Kisah Miris Petani di Negeri Agraris

Johanes Galuh Bimantara/Stefanus Ato/
Melati Mewangi/Fajar Ramadhan/Harry Susilo

Tak ada yang lebih tabah dari petani padi seperti Yana (33) dan Warsitem (49). Terpapuk saat pakecil, tetapi tak dapat untung ketika panen. Saat harga beras melambung, hidup mereka justru limbung. Kisah Yana dan Warsitem adalah cerminan miris petani yang hidup di negara agraris.

Hampir sepanjang hidupnya Yana dan Warsitem bergelut dengan padi. Dia mengenal padi melebihi keluarganya dan menganggap sawah menjadi rumah kedua. Sore itu Yana mengendarai sepeda motor bututnya dengan membonceng Warsitem menanggapi lamaran sawah di Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, medio Maret 2024. Mereka pergi setelah memastikan gulma penggangu tanaman padi dibersihkan.

Sejak tiga tahun lalu, mereka menggarap sawah seluas 3.500 meter persegi. Lahan itu disewa dengan harga Rp 10 juta per tahun atau untuk dua kali masa panen dari salah satu petani pemilik lahan di desa mereka. "Bayar sewanya setiap kali panen pakai gabah. Biaya beli pupuk atau obat-obatan saya pinjam dulu," kata Warsitem, di Desa Kalensari.

Hasil panen berupa gabah kering panen (GKP) yang diperoleh dari lahan mungil itu kerap habis untuk membayar biaya sewa lahan. Setiap kali panen, ibu tiga anak itu lebih dahulu membayar biaya sewa yang juga dilunasi dengan gabah. "Setiap kali bayar utang, gabah masih lebih sekitar 2 kuintal. Itu buat makan," ucap Warsitem.

Beli beras

Hasil panen dari sawah mungil Warsitem hanya bertahan sekitar dua bulan. Pada 2023, misalnya, sesuai panen di Oktober 2023, stok gabah tersisa untuk makan sehari-hari keluarga itu hanya bertahan dua bulan. "Setelah habis, mau enggak mau, harus *nempur* (beli) beras," ucapnya.

Keluarga Yana atau Warsitem biasanya membeli beras minimal 10 kilogram (kg). Beras itu untuk kebutuhan makan keluarga selama kurang lebih 10 hari. Saat masa pakecil selama tiga bulan terakhir, mereka membeli beras dengan harga Rp 15.000 sampai Rp 16.000 per kg.

Yana memang tak bergantung hidup dari sawah sewaan. Sebab, sebelum memiliki sawah pun dia hidup sebagai buruh tani. "Seninggu rata-rata dapat Rp 150.000 sampai Rp 200.000," katanya.

Sejak muda, Yana bekerja sebagai buruh tani. Ketika jasanya digunakan, rata-rata mendapat bayaran Rp 100.000 sampai Rp 150.000 per hari. Namun, bekerja sebagai buruh tani, tawaran pekerjaan itu tak datang setiap hari.

Mereka rutin mendapat pekerjaan setiap hari ketika musim tanam atau panen tiba. Setelah itu, tawaran pekerjaan hanya datang seminggu sekali. Kadang, dia bisa menganggur hingga berminggu-minggu.

Harga rendah

Nasib miris serupa dialami Yanto (45), petani di Sragen, Jawa Tengah. Di siang yang terik, akhir Maret silam, Yanto bersama dengan petani lain meneduh di bawah pohon kersen (*Muntingia calabura*) sembari berkeluh kesah.

Tak berselang lama, seorang petani menghampiri seraya bertanya kepada petani lain yang duduk bernama Yanto. "Sudah panen belum? Kapur jadinya panen?" tanyanya. Yanto membalas, "Saya belum panen. Itu padinya masih menancap di sawah."

Seharusnya, sawah Yanto bisa dipanen awal minggu ini, tetapi dia memilih menundanya karena harga pembelian gabah rendah, yakni Rp 5.800 per kg.

Dibanding harga sebelumnya pada Maret lalu, harga pembelian gabah Rp 7.000 per kg. Saat itu tanaman padinya belum belum siap dipanen. Dalam waktu beberapa hari, harga pembelian gabah bisa turun lebih dari Rp 1.000.

Naik turun harga pembelian gabah membuat petani menjadi gelisah. "Ini gabahnya saya simpan dulu sendiri. Nanti saya jual setelah Lebaran. Mungkin harganya bakal naik lagi setelah Lebaran," ucap Yanto optimis.

Topik obrolan disambung dengan kisah seorang pengusaha di Jakarta yang diungkap karena kasus korupsi timah dengan kerugian negara Rp 271 triliun. "Punya duit sebanyak itu kayak apa, ya?" tanyanya kepada petani lain.

Ijan (64) menjawab, "Dalam setahun, aku belum tentu bisa menabung Rp 1 juta. Harga gabah *segini-gini* saja. Enggak terbayang *gimana*."

Yanto menggelengkan kepala, membayangkan uang sebanyak itu. Kontras dibandingkan dengan uang yang bisa didapatkannya. Ia menggarap dua patok sawah atau sekitar 4.000 meter persegi dengan harga sewa per tahun Rp 8 juta per patok. Jika tanpa gangguan hama, hasil panennya mencapai 3 ton sekali musim tanam.

Sayangnya, harga gabah dibeli dengan harga murah sehingga tak menyisakan keuntungan. Perhitungan dari satu patok sawah yang menghasilkan 1,5 ton gabah membutuhkan biaya sewa lahan per satu musim tanam Rp 2,6 juta. Kebutuhan pupuk dan benih sekitar Rp 3 juta. Jika gabah dibeli Rp 5.800 per kg, total yang didapat Rp 8,7 juta. Setelah dikurangkan ongkos sewa dan biaya produksi, Yanto mengantongi Rp 3,1 juta.

Uang Rp 3,1 juta ini baru didapat setelah Yanto bekerja di sawah selama tiga bulan. Jika menggarap dua patok, Yanto mengantongi Rp 6,2 juta.

Anjloknya harga gabah saat panen raya padi tak dapat dihindari. Petani tak berdaya saat gabahnya dibeli tengkulak dengan harga di bawah Rp 6.000 per kg. Saat panen raya atau musim hujan, misalnya, tengkulak bisa menekan harga gabah di tingkat petani. Biasanya petani memilih melepas gabah karena tak punya penyimpanan gabah.

"Bilog itu punya gudang bunyak, kenapa tidak beli punya petani. Harganya jauh kalah dengan harga yang ditawarkan oleh para tengkulak. Petani mending *ngasih* ke tengkulak," ucapnya.

Padahal, biaya produksi petani tidak sedikit. Beberapa petani mengurangi beban biaya produksi dengan membuat pupuk alami dari kotoran ternak, kotoran unggas, hingga sampah organik sisi dapur. Jika tak mengatur strategi, petani bisa semakin *boncos*.

Seperti kata Yanto, "Jadi petani itu keras, sengsara, dan tidak menentu." Tak heran, banyak orang yang tidak tertarik menjadi petani.



ROSDAS JOHANES GALUH BIMANTARA

Petani penyewa lahan sekaligus buruh tani, Yana (kanan) dan Warsitem, bersiap pulang setelah membersihkan gulma di sawah mereka, di Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Minggu (17/3/2024).

BIRO HUMAS

ASI PUBLIK

Title	Melawan Permainan Calo dengan Kemitraan Petani
Date	13 Juni 2024
Media	Kompas
Page	2
Author	MEL/FRD/JOG/VAN/ILO



Melawan Permainan Calo dengan Kemitraan Petani

Petani padi masih bergantung pada keberadaan perantara untuk membeli gabah mereka. Konsep kemitraan bisa jadi langkah alternatif memangkas permainan calo. Cara ini membuat petani mendapatkan kepastian harga gabah.

JAKARTA, KOMPAS — Ketika musim panen tiba, sebagian petani sangat bergantung pada keberadaan tengkulak yang membeli gabah tanpa kepastian harga. Kemitraan secara langsung dengan petani dapat menyejahterakan mereka dengan menciptakan kepastian harga.

Gabah petani bisa dihargai tinggi, tetapi tak jarang dinilai rendah. Petani tak punya pilihan karena khawatir gabah yang sudah dipanen tidak laku. Ketidakpastian harga ini berpotensi membuat petani terus merugi.

Kondisi demikian membuat beberapa pelaku usaha penggilingan padi berinisiatif menjalin kemitraan dengan petani demi menciptakan kepastian harga yang lebih menguntungkan. Pihak penggilingan langsung membeli gabah dari petani tanpa melalui perantara sehingga memotong rantai pasok.

Wawan M (32), pemilik penggilingan gabah, mengambil gabah yang baru dipanen Sukadi (64), petani di Ngawi, Sabtu (30/3/2024). Sore itu, harga pembelian gabah yang ditawarkan olehnya Rp 5.300 per kg.

Sukadi enggan menjual gabah ke tengkulak atau calo karena biasanya ditawar dengan harga rendah. Misalnya, untuk panen gabah hari itu ditawar Rp 5.100 per kg. Menurut dia, selisih Rp 200 per kg ini amat lumayan jika dikalikan secara keseluruhan.

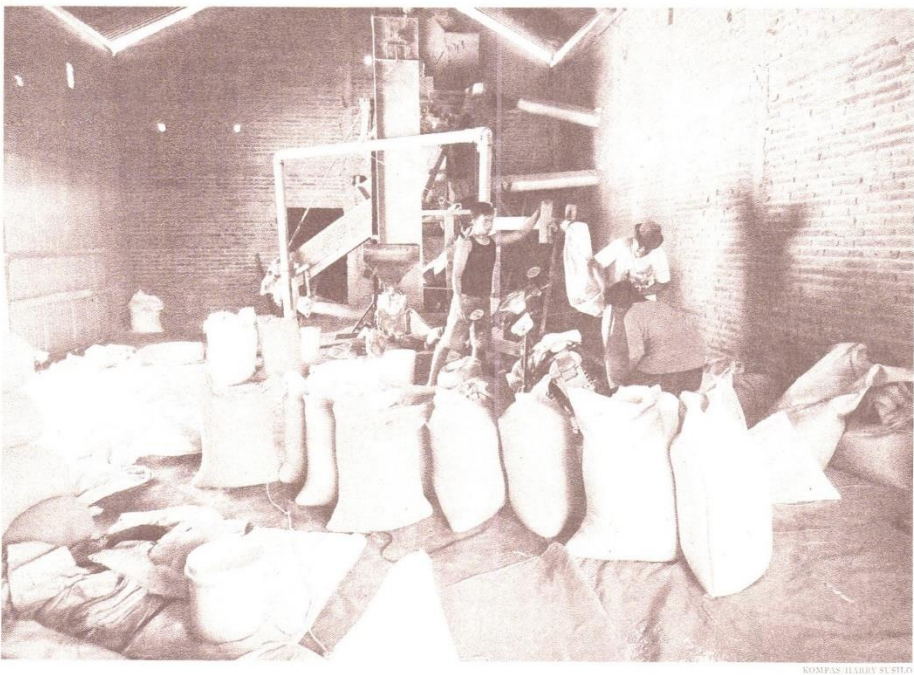
Sebaliknya, penawaran dengan harga yang tinggi dari calo patut dicurigai karena bisa saja nanti gabahnya diangkut pergi begitu saja tanpa pelunasan. Bukannya untung, petani malah merugi.

Konsep mitra yang diterapkan Wawan bertujuan untuk memangkas kehadiran calo dan tengkulak agar tidak sekenanya mematok harga gabah petani. Ia langsung mendatangi petani-petani di sawah untuk menjalin kerja sama agar gabah panen bisa diserap oleh penggilingannya. Pendekatan Wawan yang juga petani memudahkan mereka membangun kepercayaan.

Wawan menentukan harga sesuai kondisi lapangan dan informasi dari teman-teman di Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) yang biasanya saling berbagi informasi di grup pesan WhatsApp.

"Saya berani beli dengan harga lebih tinggi dari tengkulak atau makelar. Mereka (tengkulak) jangan memikirkan perut sendiri dan tidak memikirkan bagaimana nasib petani kalau gabah dibeli harga rendah. Petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, tetapi dipermainkan," ucap Wawan.

Wawan memberikan uang muka ke Sukadi senilai Rp 5 juta, 50 persen dari total kesepakatan. Sisanya dibayarkan dalam tempo tujuh hingga sepuluh hari setelah gabah selesai diproses menjadi beras.



Aktivitas penggilingan padi kecil milik Wawan (kiri) di Ngawi, Jawa Timur, Selasa (14/5/2024). Wawan merupakan salah satu pemilik penggilingan kecil yang berinisiatif menjalin kemitraan dengan petani untuk memangkas perantara pada rantai pasok gabah.

Alat penggilingan milik Wawan hanya mampu memproses gabah menjadi beras medium. Berbeda dengan alat skala industri besar yang mampu memproses hingga beras premium. Selanjutnya, beras medium disalurkan ke pasar-pasar lokal di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dia juga mengarahkan agar petani kembali ke pupuk alami, pengganti pupuk kimia. Ia mencontohkan dengan membuat pupuk alami dari kotoran ternak dan unggas yang ditanamkan pada lahan miliknya sendiri. Penggunaan pupuk alami bisa menekan biaya produksi hingga Rp 3 juta per hektar, dari luasan sawah sekitar 3.000 meter persegi milik Sukadi, gabah dipanen sebanyak 1.931 kg.

Diterapkan perusahaan

Perusahaan penggilingan padi besar seperti PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) juga menerapkan konsep kemitraan. Salah satu yang bermitra dengan PT WPI adalah Mochamad bersama komunitas petani di Ngawi. Mereka mendapatkan modal benih dan pupuk tanpa membayar terlebih dulu.

"Setiap awal musim tanam, kami sudah memesan benih dan pupuk kepada agen yang ditunjuk oleh Wilmar. Nanti pembayaran (benih dan pupuk) dipotong dari hasil gabah panen yang disetorkan ke pabrik," ujar Mochamad.

Mereka juga didampingi pi-

hak industri dan dipantau secara berkala. Bermitra dengan industri besar tak bisa dianggap ringan. Sebab, mereka harus menyiapkan dokumen pendukung untuk urusan administrasi, mulai dari pengurusan badan usaha hingga perpajakan.

Mochamad belajar untuk memahami pentingnya pencatatan detail terhadap semua hal dalam usaha tani. Tanpa perencanaan matang, alih-alih untung, petani berpotensi merugi. Misalnya strategi penggunaan pupuk menjadi salah satu fokus komunitasnya untuk meningkatkan produktivitas.

Menurut dia, konsep bermitra sebenarnya sekaligus memutus rantai pasok yang tadinya melalui makelar dan calo dalam proses penjualan gabah. Harga yang ditawarkan oleh makelar atau calo biasanya lebih rendah dibandingkan harga pabrik. Dengan demikian, petani sulit menikmati harga tinggi.

Ia mencontohkan, saat industri mematok harga pembelian gabah Rp 7.000 per kg, maka petani mitra yang tergabung dalam komunitasnya akan mendapatkan harga Rp 6.800 per kg. Selisih Rp 200 digunakan untuk beban biaya tenaga kuli angkut dan transportasi. Setiap kelompok yang bermitra dengan industri tentu memiliki penentuan harga ke setiap petani yang berbeda.

Menurut Sutrisno, petani lainnya, digitalisasi oleh Wilmar melalui aplikasi khusus justru

memudahkan petani mengetahui harga pembelian gabah secara berkala. Pengiriman gabah juga dilakukan melalui aplikasi dengan menyertakan informasi detail dari nama sopir truk yang mengantarkan ekspedisi.

Dengan bermitra pada WPI, petani merasa mendapatkan kepastian penyerapan. Mereka juga tidak bingung dengan permasalahan yang perlu disiapkan di awal musim tanam.

Saat ini jumlah petani yang terlibat kemitraan dengan WPI sebanyak 16.000 petani dengan total luasan sawah 28.000 hektar. Program kemitraan ini bekerja sama dengan ketua gabungan kelompok tani yang memiliki anggota.

Terlibat dari awal

Dalam konsep kemitraan, pihak WPI terlibat mulai dari awal proses menanam hingga panen. Sebelum ditanami, lahan dipastikan dalam kondisi baik, tidak terserang hama atau banjir.

Dalam kemitraan ini, petani tidak perlu mengeluarkan uang guna pembayaran di awal, tetapi dibayar dengan memotong hasil panen yang dijual ke WPI. "Mereka (petani) senang karena rata-rata petani tidak punya uang cash untuk beli *agributput*, terutama pupuk. Mereka tidak mendapatkan jumlah yang sesuai kalau mengharapkan pupuk subsidi," ucap Presiden Direktur PT WPI Saronto Soebagio.

Saronto menambahkan, program kemitraan WPI mengedepankan benih unggul supaya hasilnya maksimal. Petani tidak lagi menggunakan benih dari hasil panen yang disisihkan.

Menurut Saronto, tantangan program kemitraan adalah kesulitan meyakinkan petani untuk bergabung. Petani baru percaya setelah membuktikan sendiri hasilnya.

Tidak hanya perusahaan, konsep kemitraan petani juga diluncurkan Perum Bulog Mei 2024. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, saat ini masalah terbesar adalah produksi padi yang rendah. Dalam catatannya, rerata produktivitas petani secara nasional hanya 5 ton gabah kering giling (GKG) per hektar.

Terjalannya kemitraan diharapkan bisa menambah produktivitas menjadi 7 ton GKG per hektar. Saat ini total luasan sawah kemitraan petani lebih kurang 250 hektar.

Perum Bulog menyediakan pupuk dan benih bagi petani. Selanjutnya, hasil panen akan dibeli oleh mereka. Jika harga beli gabah di luar Bulog lebih mahal, Bayu mengatakan, petani dipersilakan untuk menjualnya ke pihak tersebut.

"Meningkatkan produktivitas yang paling utama. Kedua, mudah-mudahan sebagian dari peningkatan produksi itu bisa diserap untuk memperkuat stok," ucap Bayu.

(MEL/FRD/JOG/VAN/ILO)

Title	Menakar Padi Antirugi ala Penebas	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	2	
Author	FRD/JOG/MEL/VAN/ILO	

RANTAI PASOK PERTANIAN

Menakar Padi Antirugi ala Penebas

Sebari duduk di bawah pepohonan, Sadiman memandang tanaman padi dalam sepetak sawah yang tingginya hampir mencapai 1 meter. Dari kejauhan, tanaman padi tersebut mulai menguning dan sekilas terlihat siap untuk dipanen. Namun, Sadiman berpandangan lain. Padi tersebut baru siap dipanen sekitar tiga hari lagi atau saat masuk di usia 90 hari.

"Perkiraan saya tiga hari lagi bisa dipanen dalam keadaan kering. Ini masih ada hijaunya sedikit," ungkapnya saat ditemui di Kecamatan Patrol, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (30/3/2024) siang.

Hanya dengan memperhatikan sawah tersebut, Sadiman bisa mengetahui jenis padi di lahan itu adalah varietas Inpari 32. Dia memperkirakan, bobot padi dalam 1 meter persegi bisa mencapai sekitar 7,5 ons. Jika dikalikan dengan luas lahan yang mencapai 3.000 meter persegi, produktivitasnya diperkirakan sekitar 2,25 ton gabah kering panen.

Jika dikalikan dengan harga

gabah pada saat itu, yakni sekitar Rp 5.900 per kilogram, maka sawah petani tersebut layak di-hargai sekitar Rp 13,3 juta. Artinya, jika ingin membeli sawah petani tersebut dengan sistem borongan, harga yang ditawarkan kepada petani berkisar Rp 10 juta-Rp 11 juta.

"Yang penting masih ada selisih. Sekitar Rp 1 juta nanti buat sewa alat pemotong padi dan tenaga," katanya.

Sadiman adalah penebas asal Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dia biasa membeli tanaman padi dari petani dengan sistem borongan. Sebelum padi dipanen, dia sudah membeli petak sawah petani dengan harga yang disepakati bersama. Seperti pada Sabtu siang, dia sedang mencari sawah yang potensial untuk dibeli di Ngawi.

Keahlian Sadiman untuk menakar lahan petani tidak datang ujug-ujug. Dia sudah menjalani peran sebagai penebas selama 34 tahun. Ilmu yang dimiliki Sadiman merupakan turunan dari sang ayah yang juga sebagai penebas. Selain padi, sang ayah

juga menjadi penebas untuk se-tjumlah tanaman, seperti ja-gung, semangka, melon, blewah, dan kacang.

Daya jelajah Sadiman juga tak main-main. Selain datang ke Ngawi yang berjarak sekitar 30 kilometer dari rumahnya di Sragen, dia juga kerap mencari lahan hingga ke daerah Kabu-paten Tegal, Jawa Tengah, hing-ga Cirebon, Jawa Barat. Dia pergi bersama istri mengenda-rai kendaraan pribadi.

"Jaringan harus kuat. Saya biasa berhubungan sama ma-kelar-makelar di daerah. Mere-ka yang mencarikan lahan (siap panen)," katanya.

Selalu untung

Meski pekerjaan yang dila-koni sangat berisiko, Sadiman mengaku belum pernah meng-alami rugi. Padahal, dia cukup sering membeli sawah yang ma-sih cukup muda, yakni satu bu-lan sebelum masa panen. Saat harga gabah tiba-tiba anjlok, pria yang menjadi penebas se-jak 1990-an ini hanya menang-gung risiko mendapatkan ke-untungan tipis.

Sebagai gambaran, Sadiman pernah memborong sawah pe-tani seluas 3.400 meter persegi senilai Rp 14 juta saat harga gabah di angka Rp 6.400 per kilogram. Pada saat panen, har-ga gabah turun menjadi Rp 5.900 per kilogram. Meski de-mikian, dia tetap mendapat un-tung karena hasil gabahnya laku di angka Rp 17 juta.

Pada periode pertengahan Maret hingga awal April 2024, harga gabah kering panen (GKP) di daerah Ngawi dan Sragen turun secara berkala. Di awal masa panen, harga bisa di atas Rp 8.000 per kilogram, sedangkan pada awal Maret harga di angka Rp 5.400 per kilogram. Hal ini menjadi tan-tangan bagi para penebas.

Sadiman kini lebih hati-hati dalam memborong sawah pe-tani. Jika dulu dia berani mem-beli sawah jauh-jauh hari se-belum panen, kini dia menahan diri. Dia enggan terlalu ber-spekulasi dan memilih membeli sawah dengan produktivitas yang bagus.

Bayangan mendapatkan ke-untungan besar juga mendo-

rong Suwandi, pemuda asal Ngawi, Jawa Timur, turut ber-gelut menjadi penebas. Meski menyandang predikat sebagai lulusan teknik mesin, dia lebih suka bersua dengan petani dari sawah ke sawah.

Suwandi mengakui, penebas adalah profesi yang mengede-pankan spekulasi. Risiko keru-gian menjadi bayang-bayang yang tak bisa dihindari. Namun, kerugian menjadi penebas, me-nurut dia, tidak sebanding de-ngan keuntungan yang dida-pat.

"Katakanlah di lokasi A saya bisa rugi, tapi itu bisa ditutup sama keuntungan di lokasi B. Bahkan, masih ada kelebihan-nya," ungkapnya.

Suwandi mengaku pernah meraup untung hingga Rp 20 juta dari hasil menebas di satu lokasi. Kala itu dia menebas lahan seluas 15 patok atau seta-ra dengan 4.500 meter persegi. Menurut dia, semakin lama se-seorang menebas, semakin ter-asah ilmu yang dimiliki. Ilmu-nya hanya satu, yaitu teliti da-lam melihat.

(FRD/JOG/MEL/VAN/ILO)

Title	Perantara Menguasai Rantai Pasok Gabah Petani	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	1 Part 1	
Author	FRD/JOG/MEL/VAN/ILO	

Perantara Menguasai Rantai Pasok Gabah Petani

Rantai pasok gabah petani dikuasai jaringan perantara secara berjenjang. Kondisi ini menyulitkan petani mendapatkan keuntungan yang optimal dari usahanya menanam padi.

Perantara dalam Rantai Pasok Gabah

Gambaran rantai pasok gabah dari petani ke produsen di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Semakin panjang rantai pasok gabah dari petani ke produsen beras, maka kian membebani petani dari sisi harga beli gabah hasil panen.

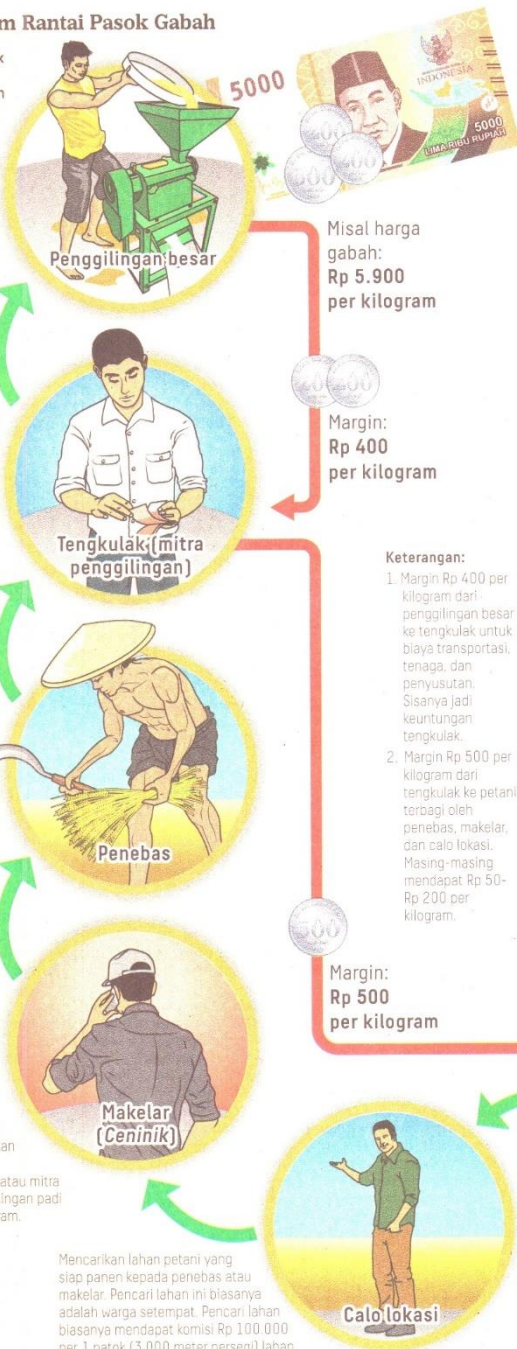
Mengambil gabah petani melalui perantara seperti penebas, calo, dan makelar kemudian menyalurkan ke penggilingan padi skala besar.

Memorong hasil panen petani sebelum atau saat panen. Menjalin komunikasi dengan makelar dan calo lokasi sebagai penghubung dengan petani.

Menghubungkan petani dengan penebas atau tengkulak. Makelar biasanya meminta komisi kepada petani Rp 50-Rp 100 per kilogram gabah yang terjual.

Makelar juga mendapatkan komisi dari penebas, penggilingan padi kecil, atau mitra dari perusahaan penggilingan padi Rp 50-Rp 100 per kilogram.

Mencarikan lahan petani yang siap panen kepada penebas atau makelar. Pencari lahan ini biasanya adalah warga setempat. Pencari lahan biasanya mendapat komisi Rp 100.000 per 1 patok (3.000 meter persegi) lahan yang dia cari.



Keterangan:

1. Margin Rp 400 per kilogram dari penggilingan besar ke tengkulak untuk biaya transportasi, tenaga, dan penyusutan. Sisanya jadi keuntungan tengkulak.
2. Margin Rp 500 per kilogram dari tengkulak ke petani terbagi oleh penebas, makelar, dan calo lokasi. Masing-masing mendapat Rp 50-Rp 200 per kilogram.

JAKARTA, KOMPAS — Penelusuran Kompas di sejumlah sentra padi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, April hingga Juni 2024, menemukan bahwa jaringan perantara menguasai distribusi gabah. Setidaknya distribusi gabah melalui empat hingga lima pihak sebelum masuk ke penggilingan padi.

Kompas menyaksikan tawar-menawar perantara pabrik besar dan petani di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Senin (14/2024). Perantara berinisial SR menawarkan Rp 5.300 untuk setiap kilogram (kg) gabah kering panen (GKP) ke petani. Untuk memperlancar upayanya, ia mengatakan, harga GKP di penggilingan besar-sedang Rp 5.600 per kg. Padahal, harga yang sebenarnya Rp 5.700-Rp 5.800 per kg, merujuk aplikasi produsen beras yang menjadi mitra SR.

Saat dikonfirmasi, SR ber alasan butuh mengalokasikan Rp 400 per kg dari harga GKP untuk biaya transportasi, tenaga, dan risiko penyusutan serta penolakan GKP.

Dalam sehari, SR bisa mendapatkan keuntungan bersih Rp 619.220 sekali pengiriman GKP ke penggilingan. Ia mengaku dalam sehari bisa mengirim 10 kali. Artinya, dia bisa mendapatkan keuntungan Rp 6.192.200 per hari.

Kompas juga menemui DN, yang disebut SR sebagai makelar atau calo. DN berperan sebagai pihak yang menghubungkan SR dengan petani yang sawahnya siap panen. Siang itu, DN sedang duduk di depan rumah SR.

Biasanya, DN mendapatkan komisi Rp 50 per kg dari SR. Meski demikian, DN juga mengambil keuntungan dari petani Rp 100 per kg. Saat harga GKP di tingkat petani Rp 5.300 per kg, SR membeli gabah dari

LIPUTAN KHUSUS

BACA JUGA HLM 2

DN senilai Rp 5.350 per kg. Sementara uang yang diterima petani hanya Rp 5.200 per kg.

"Petani inginnya terima beres. Jadi saya yang mondar-mandir. Masalah harga tak jadi patokan. Nanti dari sini saya sampaikan ke petani," ujar DN.

Petani tertekan

Umumnya, rantai pasok gabah di Ngawi dimulai dari petani, makelar, tengkulak, hingga penggilingan padi skala besar. Namun, jalur distribusi seperti ini belum tentu berlaku untuk semua petani. Semakin banyak perantara yang terlibat membuat harga gabah di tingkat petani kian ditekan hingga keuntungan petani makin tipis.

JH (48), pemilik penggilingan padi skala kecil di Ngawi, kadang dirugikan, tetapi juga membutuhkan calo pada kondisi tertentu. Sebelum gabah petani masuk penggilingannya, ia harus melewati pencari lahan, makelar, dan penebas. Saking banyaknya calo, sesama calo bisa saling jual beli gabah petani. Ini yang membuatnya

(Bersambung ke him 15 kol 4-7)

>> BACA JUGA:

Ribuan Penggilingan Padi Mati

Penggilingan padi skala kecil di daerah terpaksa berhenti beroperasi karena kesulitan dana dan persaingan.

KOMPAS.ID

klik.kompas.id/penggilinganpadi

Sumber: Penelusuran Tim Kompas

INDONESIA KOMPAS

Title	Perantara Menguasai Rantai Pasok Gabah Petani	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	1 Part 2	
Author	FRD/JOG/MEL/VAN/ILO	

Perantara Menguasai Rantai Pasok Gabah Petani

(Sambungan dari halaman 1)

harus membeli gabah dengan harga lebih tinggi daripada ke petani langsung.

"Kebanyakan saya ambil gabah dari calo. Kalau yang langsung ke petani hanya ada satu-dua orang," ungkapnya.

Pencari lahan sawah berperan menginformasikan ke makelar di mana sawah yang siap panen. Makelar lalu mencari penebas yang mau membeli hasil panen di lahan tersebut. Dari penebas, gabah akan ditawarkan kepada makelar lain atau langsung ke penggilingan padi. Jika melibatkan makelar lain, jumlahnya bisa lebih dari satu orang.

JH pernah membeli gabah basah ke perantara Rp 5.600 per kg. Usut punya usut, perantara itu membeli gabah dari petani dengan harga Rp 5.000 per kg. Dari sini, keuntungan perantara Rp 600 per kg tanpa modal apa pun.

Berjenjang

Dominannya peran perantara dalam rantai pasok gabah juga terjadi di Subang dan Indramayu, Jawa Barat. Setelah panen padi, perantara terlibat dalam penjualan gabah secara berjenjang, dari bandar (di tempat lain kadang disebut tengkulak), kemudian koordinator lapangan, dan calo lokasi.

Adang, salah seorang perantara gabah di Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, menjelaskan peran perantara yang menentukan perjalanan gabah dari petani hingga ke penggilingan padi.

Bandar, manajer, dan *sup-*

plier merupakan tangan pertama yang dijangkau pabrik. Istilah bandar untuk menyebut pengusaha penyalur gabah yang dengan modal sendiri terlebih dahulu menyerap gabah petani, lalu menjualnya ke penggilingan.

Adapun manajer merupakan istilah dari calo yang mampu mencari gabah hingga 40 ton sehari, sedangkan *supplier* dengan jaringan lebih luas mampu mendapatkan gabah sampai 100-150 ton sehari. Namun, mereka biasanya lebih dahulu dimodali pabrik dalam membeli gabah.

Bandar, manajer, dan *supplier* tidak langsung menjangkau petani. Mereka mesti lewat perantara, yaitu koordinator lapangan (korlap) dan calo lokasi. Korlap adalah penghubung dengan calo lokasi antarkampung atau antarkecamatan. Adapun calo lokasi merupakan perantara yang "menguasai" wilayah kampung atau desa, dan mereka yang langsung berkomunikasi dengan para petani.

Deni, pengusaha penggilingan padi di Subang, menyebut pabrik sebenarnya tahu harga gabah di tingkat petani. Namun, peran calo sulit dilepas karena pengusaha tak mampu menandingi kekuatan jaringan calo. Gambarnya, kata Deni, jika pabrik butuh 100 ton gabah sehari, dan produktivitas petani 5 ton per hektar, berarti pengusaha harus mencari panen dalam satu hari di lahan seluas 20 hektar. "Nyari petani yang panen 20 hektar sehari itu tak mudah," ucapnya.

Apalagi, banyak petani yang mengelola lahan kurang dari

sehektar per orang. Selain itu, pengusaha juga kerap butuh jenis padi yang seragam. Jika sedang mencari padi jenis inpari 32, panen jenis ciherang bakal diabaikan.

Perhitungan Deni, dari harga gabah di tingkat petani, ia menambahkan Rp 300-Rp 500 per kg untuk pengangkutan ke pabrik serta membayar komisi calo.

Tanpa perantara

Tanpa bergantung pada perantara, petani sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Hal ini tercermin dari pendapatan sejumlah petani yang bermitra langsung dengan penggilingan padi besar. CH, petani asal Ngawi, mampu menjual gabahnya Rp 5.600 per kg saat penggilingan padi menetapkan plafon GKP Rp 5.800 per kg. Selisih Rp 200 per kg digunakan untuk membayar jasa angkut dan transportasi.

"Kalau tengkulak ambil harga Rp 5.200 per kg. Berarti dia ambil komisi Rp 400 per kg. Kalau kami langsung ke penggilingan padi tidak kena potongan itu," kata CH.

Kondisi sebaliknya dialami Kasum (70), petani Desa Karya Bakti, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ia hampir selalu didatangi tengkulak untuk menawar gabahnya setiap akan panen. Tidak ada pihak lain yang menawar gabahnya kecuali tengkulak sehingga ia tidak punya pilihan untuk menjual gabahnya 1,5 ton kepada tengkulak senilai Rp 9 juta, Maret 2024.

Artinya, per kg gabahnya di-

harga Rp 6.000 per kg. Sementara modal yang dikeluarkan Kasum dari penanaman hingga panen sekitar Rp 3,5 juta. Ini membuatnya hanya meraih keuntungan bersih Rp 6,5 juta selama empat bulan. "Saya terpaksa menjual setengah hektar sawah untuk menambal kebutuhan," katanya di Karawang, Senin (10/6).

Tanpa hubungan baik dengan tengkulak, ia kesulitan mendapatkan modal untuk proses tanam atau panen. Selama ini petani kerap meminta pinjaman kepada tengkulak. Sebagai timbal baliknya, gabah akan dijual kepada mereka.

Koordinator Pusat Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Wisnu Setiadi Nugroho menilai panjangnya rantai pasok beras membuat peran pedagang perantara menjadi sangat sentral. Petani mengandalkan peran mereka dalam penyerapan gabah.

"Petani tidak punya kemampuan penyimpanan yang baik sehingga mereka harus cepat-cepat menjual kepada tengkulak. Mereka juga butuh modal untuk panen," katanya.

Mengutip data Wisnu, di Jawa Timur, 80 persen keuntungan rantai pasok beras dikuasai perantara, seperti makelar, tengkulak, dan penebas. Petani dan penggilingan hanya menikmati 20 persen keuntungan. Sementara di Jawa Barat, perantara memperoleh keuntungan 40 persen, sedangkan 60 persennya dikuasai penggilingan dan penjual grosir.

(FRD/JOG/MEL/VAN/ILO)

Tittle	Bulog Siap Akuisisi Perusahaan Beras	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Koran Kontan	
Page	14	
Author	Lailatul Anisah	

■ PENGADAAN BERAS

Bulog Siap Akuisisi Perusahaan Beras

JAKARTA. Opsi pemerintah mengamankan cadangan beras pemerintah bertambah. Selain dari pasokan dalam negeri dan impor, ada opsi teranyar, yakni rencana Bulog mengakuisisi perusahaan beras dari Kamboja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim telah memperhitungkan secara matang rencana akuisisi perusahaan beras tersebut. Bahkan ia menyebutkan, upaya ekspansi ke luar negeri melalui investasi perusahaan pelat merah ini

Bulog sudah berkomunikasi dengan perbankan nasional.

lebih baik daripada hanya sekadar melakukan pembelian beras dari Kamboja.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pun siap menindaklanjuti rencana akuisisi tersebut. Dia sudah melakukan *due diligence* terhadap beberapa sumber beras di Kamboja.

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi memastikan sudah berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh dan

beberapa pelaku usaha beras di Kamboja terkait rencana ekspansi itu. "Pada dasarnya kami siap melaksanakan penugasan tersebut," jelas dia kepada KONTAN, kemarin.

Bayu optimistis rencana akuisisi tersebut bisa direalisasikan. Apalagi Bulog sudah melakukan perdagangan beras dengan Kamboja sejak 2023. Kerja sama itu lewat skema *business to business* (B2B) maupun *government to government* (G2G).

Ihwal rencana akuisisi, Bulog juga telah melakukan pembicaraan awal dengan perbankan nasional. Hanya saja, Bayu tidak menyebut berapa nilai anggaran yang disiapkan oleh Bulog terkait rencana tersebut. "Intinya, kami juga melakukan pembicaraan awal dengan perbankan nasional terkait peluang investasi tersebut," jelas dia.

Pengamat Pertanian Center of Reform (Core) Indonesia, Eliza Mardian menilai, seharusnya pemerintah justru berinvestasi hal sejenis di pasar dalam negeri ketimbang negara lain. Sebab, investasi itu bakal melibatkan banyak pihak dan bisa menumbuhkan ekonomi serta tenaga kerja ketimbang hanya mengejar pangan murah. "Jika investasi dilakukan di dalam negeri tentu melibatkan petani," jelas dia, kemarin.

Lailatul Anisah



BIRO

ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

Rencana Bulog mengakuisisi perusahaan beras dari Kamboja.

BLIK

Title	Waspada Lonjakan Harga Bahan Pokok	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Koran Kontan	
Page	15	
Author	Hartoyo M	

Surat

Waspada Lonjakan Harga Bahan Pokok

Miris juga mendengar informasi soal potensi terjadi kekeringan pada tahun ini. Jika hal itu betul terjadi, maka bakal membuat hasil pertanian dalam negeri menjadi kurang optimal. Keberadaan air, termasuk air hujan amat penting bagi hasil pertanian, apalagi di negeri tropis seperti Indonesia.

Janganakan memandang adanya potensi kekeringan dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini saja, harga-harga bahan pokok, yang biasanya selalu diumumkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Apalagi, pemerintah juga sudah mengumumkan kenaikan beberapa harga eceran tertinggi (HET) dari beberapa bahan pokok, termasuk harga beras.

Memang, harga beras untuk saat ini sudah mengalami tren penurunan ke-timbang di awal tahun. Tepatnya di tiga bulan pertama tahun 2024. Ibu-ibu rumah tangga pun kini bisa kembali tersenyum saat membeli bahan pokok utama tersebut yang harganya sudah kembali seperti setahun lalu.

Namun harga kebutuhan pokok lainnya ada yang naik. Misalnya saja minyak goreng, yang secara perlahan

mulai menanjak naik.

Maka bisa dibayangkan dalam beberapa bulan ke depan, harga sejumlah kebutuhan pokok bisa kembali merangkak naik. Terus terang masyarakat kebanyakan tidak setuju dengan kondisi tersebut. Sudah pasti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok bisa membuat daya beli masyarakat semakin melemah. Apalagi, pendapatan tidak kunjung naik signifikan.

Masyarakat semula bisa membeli minyak goreng dengan gampang untuk ukuran 2 liter, nantinya cukup 1 liter saja. Begitu pula saat membeli kebutuhan pokok lainnya. Kondisi ini harus membuat semua pihak, terutama penguasa harus sigap mengatasi persoalan kenaikan harga barang.

Hartoyo M,
Tangerang, Banten

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Jaga Cadangan Pangan, Bulog Serap 700 Ribu Ton Beras Petani	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	14	
Author	Media Indonesia	

Jaga Cadangan Pangan, Bulog Serap 700 Ribu Ton Beras Petani

DALAM menjalankan tugas mengadakan dan menjaga stok, saat ini Bulog memiliki stok cadangan pangan dengan volume yang ideal, yakni 1,8 juta ton. Sebagai upaya menjaga stok dengan volume ideal tersebut, Bulog terus mendahulukan pengadaan gabah/beras dalam negeri saat musim panen.

Hingga pertengahan Juni 2024 Bulog telah menyerap produk petani dalam negeri sebanyak hampir 700 ribu ton. Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa Bulog juga melaksanakan tugas pemerintah melakukan pengadaan beras dari luar negeri.

Bulog mendapatkan penugasan importasi dengan dikeluarkannya izin impor sebanyak 3,6 juta ton. "Bulog telah merealisasikan kegiatan importasi tersebut sebesar 2 juta ton melalui 26 pelabuhan di seluruh Indonesia dan mengutamakan pelabuhan di daerah non-sentra produksi," katanya seperti dikutip dari keterangan yang diterima pada Rabu (12/6).

Tanjung Priok, sambung Bayu, sebagai pelabuhan utama dan terbesar di Indonesia yang menjadi salah satu pelabuhan masuknya beras impor. (Ekonomi)



M/USMAN ISKANDAR

Tittle	Jelang Idul Adha, Pasokan Pangan Stabil Harga Merangkak Naik	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	2	
Author	Fal/HS/AD/YH/UL/BB/DG/X-3	

Jelang Idul Adha, Pasokan Pangan Stabil Harga Merangkak Naik

SEMAKIN mendekati perayaan Hari Raya Idul Adha 2024, harga sejumlah kebutuhan pangan terpantau naik di sejumlah daerah di Indonesia. Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memproyeksikan harga pangan stabil dengan kondisi pasokan yang aman hingga Idul Adha.

Kenaikan harga beras salah satunya terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Harga beras medium dan premium meningkat melewati harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Itu terlihat di agen beras Pasar Larangan Sidoarjo. Harga beras jenis medium mencapai Rp13 ribu per kilogram, sedangkan beras premium sebesar Rp16 ribu per kilogram.

Harga beras itu diperkirakan masih akan terus naik hingga hari raya nanti. "Tapi konsumen yang membeli memang biasa dengan kenaikan ini karena mendekati Idul Adha," kata pedagang beras, Rifai, kemarin.

Di Kupang, saat Pj Wali Kota Kupang Fahrensy Priestley Funay mengunjungi pasar tradisional Oeba di Kelurahan Fatubesi, terpantau rata-rata harga kebutuhan pokok di tingkat pedagang mengalami kenaikan.

Sebagai contoh, harga ikan belang kuning yang biasanya dijual sebesar Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kg naik menjadi Rp50 ribu per kg.

Bawang putih dan bawang merah dijual di kisaran Rp40 ribu sampai Rp50 ribu per kg dari biasanya Rp35 ribu per kg. "Kami selalu berupaya menjalin komunikasi dengan para pemasok dan berupaya agar beberapa bahan pokok harganya bisa normal kembali," ujar Fahrensy.

Di tempat lain, Kepala UPT Pasar Cikurubuk, Cimahi, Jawa Barat, Deri Herlisana mengatakan harga bahan pokok jelang Idul Adha tahun ini mulai naik, terutama cabai merah, bawang merah, telur, beras, dan daging ayam. Kenaikan itu disebabkan banyak petani belum masuk masa panen. "Kebutuhan pokok mulai naik (sehingga) membuat harga naik," katanya.

Ia mencontohkan telur semula seharga Rp26 ribu menjadi Rp28 ribu per kg, cabai merah rata-rata masih dijual Rp65 ribu-Rp 70 ribu per kg, dan bawang merah Rp55 ribu.

Dari Jakarta, Bapanas memastikan kondisi ketersediaan pangan jelang Idul Adha 2024 dalam kondisi aman. Bapanas juga memproyeksikan harga pangan stabil, salah satunya akibat penurunan permintaan pasar yang bertepatan dengan tahun ajaran baru anak sekolah.

"Tapi kita juga minta semua pihak agar bersama-sama terus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan," tegas Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, kemarin. (Fal/HS/AD/PO/YH/UL/BB/DG/X-3)

Title	Kekayaan Intelektual Berpotensi jadi Pengdongkrak Ekonomi Nasional	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	1	
Author	Dinda Shabrina	

Kekayaan Intelektual Berpotensi jadi Pendongkrak Ekonomi Nasional

Seluruh pemangku kepentingan harus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan ekosistem KI yang kondusif.

DINDA SHABRINA
dinda@mediaindonesia.com

POTENSI kekayaan intelektual (KI) ternyata berpotensi untuk menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ekonomi kreatif sebagai wujud pemanfaatan kekayaan intelektual mencatatkan kontribusi sebesar 7,6% atau kurang lebih Rp1.280 triliun di tahun 2022.

Melihat potensi ini, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia.

Hal itu sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkompeten dan berdaya saing melalui KI.

Pada puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia: Forum Indikasi Geografis Nasional, Temu Bisnis & Apresiasi Insan Kekayaan Intelektual 2024, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly meminta agar seluruh pemangku kepentingan saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan ekosistem KI yang kondusif.

"Ekosistem KI adalah sebuah siklus berkelanjutan yang melibatkan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu kreasi, proteksi, dan pemanfaatan. Pembangunan ekosistem KI saat ini masih berada pada tahap awal, artinya masih banyak yang perlu dilakukan untuk

mencapai kematangan dan keberlanjutan," jelas Yasonna dalam acara Forum Indikasi Geografis Nasional, Temu Bisnis, dan Apresiasi Insan Kekayaan Intelektual 2024 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, (12/6).

Menurut Yasonna, peningkatan kapasitas atau sumber daya masyarakat terkait KI dapat menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem KI.

Dia menyebut DJKI telah membentuk *National Intellectual Property Academy* (NIPA), yang dikenal dengan nama *Indonesian IP Academy* pada 7 Juli 2023. Pembentukan *Indonesian IP Academy* sebagai pusat edukasi KI Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas berbagai pemangku kepentingan, dan menyediakan informasi dan pemanfaatan KI.

Tak hanya itu, Indonesia turut aktif dalam berbagai forum KI internasional, salah satunya adalah *Diplomatic Conference on Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge* (GRATK/DC) di Jenewa, Swiss, pada 13-24 Mei 2024 lalu.

"Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan pentingnya instrumen hukum internasional untuk melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, serta peran WIPO dalam mewujudkan upaya-upaya tersebut," ujarnya.

Forum Indikasi Geografis

Tahun 2024 telah ditetapkan sebagai Tahun Indikasi Geografis yang diharapkan dapat menjadi momentum



PERINGATAN HARI KEKAYAAN INTELEKTUAL SEDUNIA: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyampaikan sambutan saat membuka peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia di Jakarta, kemarin. Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia: Forum Indikasi Geografis Nasional, Temu Bisnis & Apresiasi Insan Kekayaan Intelektual 2024 mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan ekosistem KI yang kondusif.

bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan pendaftaran, mempromosikan, serta memberdayakan produk-produk indikasi geografis (IG) Indonesia.

"IG memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah dengan meningkatkan nilai jual produk dan membuka peluang ekspor. Contohnya, Garam Amed di Bali yang nilai jualnya meningkat dari Rp4.000/kg menjadi Rp35.000/kg setelah terdaftar sebagai produk IG. Selain itu, ada Kopi

Gayo dari Aceh yang nilai jualnya meningkat dari Rp50.000/kg menjadi Rp120.000/kg setelah terdaftar sebagai produk IG di Uni Eropa," ucap Yasonna.

Sebagai informasi, IG merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau

produk yang dihasilkan.

Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Hingga saat ini, telah terdaftar setidaknya 138 produk IG dari berbagai wilayah di Indonesia dan 15 produk IG terdaftar dari luar negeri. Jumlah ini, kata Yasonna, masih harus

terus ditingkatkan mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya yang melimpah.

Pada kegiatan ini turut dilakukan Pengukuhan Tim Pembinaan IG Nasional yang beranggotakan 14 kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Standarisasi Nasional, Universitas Indone-

sia, Institut Pertanian Bogor, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Dewan Kerajinan Nasional.

Selain itu, sejumlah Anugerah Kekayaan Intelektual Indonesia diberikan kepada penerima dengan beberapa kategori.

Pertama adalah *WIPO Awards*. *WIPO National Award for Inventor* diberikan kepada Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga Dr. Purwati, dr., Sp.PD, K-PTI, FINASIM). *WIPO National Award for Creativity* diberikan kepada Itang Yunasz. *WIPO National Award for Enterprises* untuk Pusat Penelitian Nanosains & Nanoteknologi Institut Teknologi Bandung dan

WIPO National Award for Schoolchildren diberikan kepada Muhammad Deliang Al-Farabi.

Beberapa Penghargaan KI Nasional juga telah diberikan kepada mereka yang menghasilkan KI terbanyak, yaitu Perguruan Tinggi dengan Kekayaan Intelektual terbanyak pada Tahun 2023 (Universitas Andalas).

Pemerintah Daerah yang melakukan Fasilitas Permohonan Kekayaan Intelektual Terbanyak pada tahun 2023 (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta).

Perusahaan dengan Kekayaan Intelektual terdaftar terbanyak di tahun 2023 (PT Budi Agung Sentosa).

Individu dengan Kekayaan Intelektual terdaftar terbanyak di tahun 2023 (K.H. Ahmad Rizka Muftafa). Lembaga Perwakilan Masyarakat Pemilik Indikasi Geografis Terbaik (MPIG Kopi Arabika Koerinti Provinsi Jambi. (S-1)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	Wujudkan Potensi Indikasi Geografis hingga Komersial	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	2	
Author	Dinda Shaberina	

Wujudkan Potensi Indikasi Geografis hingga Komersial

Pendaftaran produk sebagai indikasi geografis saja tidak cukup. Para produsen juga harus melakukan upaya peningkatan nilai produk mereka.

DINDA SHABERINA
dinda@mediaindonesia.com

SEBAGAI negara dengan biodiversitas yang sangat tinggi, Indonesia memiliki beragam produk pertanian hingga perkebunan yang unik. Bumi Indonesia juga kaya akan budaya yang membuatnya menarik dan berciri khas.

Dengan keunggulan itu, pemerintah memandang bahwa dua keistimewaan yang dimiliki Indonesia dinilai akan mengantarkan kemajuan ekonomi nasional dari daerah.

Langkah pemajuan itu dimulai salah satunya dengan menemukan potensi produk indikasi geografis daerah. Deputi Riset dan Inovasi Daerah Yopi menjelaskan tugas tersebut dilakukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). Badan tersebut merupakan hasil sinergi Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan pemerintah daerah.

"Kami berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat penelitian dan pengembangan dari berbagai perangkat daerah. Dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, bapak, ibu punya kewenangan melakukan riset untuk pemajuan iptek," terang Yopi pada Forum Indikasi Geografis Nasional, kemarin, di Shangri-La Hotel, Jakarta.

Dari 550 pemerintah daerah di Indonesia, 37 pemerintah provinsi dan 471 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki Brida. Lembaga itu bisa

dimanfaatkan asosiasi produsen dari produk indikasi geografis untuk membuktikan kekhasan produknya sehingga lolos sebagai indikasi geografis terdaftar.

"Kami memberikan fasilitasi penguatan kelembagaan, konsultasi, bimbingan teknis, dan kajian untuk para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, agar lebih banyak lagi potensi produk indikasi geografis yang terdaftar," ucap Yopi.

Meski begitu, tim Ahli Indikasi Geografis Surip Mawardi justru menerangkan bahwa pendaftaran produk sebagai indikasi geografis saja tidak cukup. Para produsen atau biasanya disebut masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) harus melakukan upaya peningkatan nilai produknya.

"Ada beberapa strategi dimulai dari memperkuat organisasi MPIG, menerapkan sistem jaminan mutu, memperbanyak barang siap konsumsi, membuat diversifikasi produk, sampai membuat promosi serta layanan yang baik. Jangan lupa, bangun aliansi bisnis strategis, misalnya dengan *co-branding* dengan merek yang sudah ternama," ujar Surip.

Surip menambahkan bahwa poin mempersiapkan lebih banyak produk siap konsumsi karena kebanyakan produk indikasi geografis dalam negeri berupa perkebunan dan pertanian, utamanya kopi. Sekitar 37% atau 43 produk indikasi geografis dari 135



Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Acara Forum Indikasi Geografis Nasional, Temu Bisnis, dan Apresiasi Insan Kekayaan Intelektual 2024.

produk merupakan komoditas kopi.

Ketua MPIG Muhammad Khodim menyampaikan Kakao Berau telah membuktikan pentingnya bersinergi dengan banyak pihak termasuk pemerintah daerah hingga sektor perbankan. Kakao Berau saat ini telah berhasil berekspansi ke Italia, Inggris, Belanda, Australia, dan Jepang.

"Kami bekerja sama dengan bank untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) dan berkat rekomendasi dari MPIG yang kuat, KUR bisa cair bah-

kan dalam dua hari," ungkap Khodim.

MPIG Kakao Berau juga telah menggunakan sistem penelusuran mutu produk melalui situs *KoltriTrace*. Dengan sistem itu, MPIG dapat memastikan produk yang diterima konsumen memiliki kualitas yang tinggi.

Khodim berpesan untuk seluruh masyarakat daerah agar terus memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada. Perjuangan menyukseskan produk indikasi geografis akan berhasil asalkan tetap gigih.

Bangun komitmen

Direktur Jenderal KI Kemenkumham Min Usihen mengatakan kegiatan Forum IG Nasional, Temu Bisnis, Apresiasi Insan Kekayaan Intelektual 2024 dan ajang KI Expo merupakan puncak dari rangkaian peringatan Hari KI Sedunia 2024 yang sudah dimulai sejak 26 April lalu.

"Kegiatan forum ini dimaksudkan untuk membangun komitmen bersama untuk mendukung tahun 2024 sebagai tahun indikasi geografis

(IG), juga memperkenalkan produk-produk IG terdaftar, baik IG Nasional maupun IG Uni Eropa," kata Min seperti dikutip dari laman Kemenkumham.

Selain itu, ujar Min, pada pertemuan itu dilakukan diskusi isu-isu terkini, permasalahan, kebijakan, dan hal-hal teknis lainnya terkait IG dan paten. "Yang tak kalah pentingnya adalah forum ini juga mempertemukan inventor dan investor," ucap Min.

Pada acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan

perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal (Ditjen) KI serta Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pembinaan dan Pelindungan Merek dan IG dalam rangka Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, lalu dengan Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional tentang Pengembangan, Pemanfaatan dan Optimalisasi Perpustakaan di Bidang KI. (Ant/X-10)

Tittle	Panen Bawang di Perkotaan	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Pikiran Rakyat	
Page	5	
Author	Tommi Andryandy	

Panen Bawang di Perkotaan

CIKARANG, (PR).-

TNI AD bersama Kementerian Pertanian memanen bawang merah di lahan *urban farming* di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (11/6/2024). Panen ini diklaim sukses meningkatkan lahan produksi, apalagi ditanam di lahan perkotaan.

“Membangun *urban farming* untuk penguatan ketersediaan pangan ini harus dilakukan efektif. Ternyata, di bawah jembatan dan sepanjang jalan tol, masih ada lahan tidur ribuan meter bahkan berhektare-hektare dan hasilnya sangat produktif,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak di lokasi.

Maruli mengatakan, panen raya dilakukan di lahan tidur yang diubah menjadi kawasan *urban farming*, komoditas bawang merah. Bekerja sama dengan Kementan, pihaknya lantas turut mendukung pencetakan sawah skala besar. Selain itu, turut juga dioptimalkan penanaman yang semula sekali setahun menjadi dua-tiga kali.

“Ada pompanisasi dan optimasi lahan termasuk pembukaan lahan baru. Kalau lahan di perkotaan dengan membangun kawasan *urban farming*. Setelah dikerjakan, kami bersyukur dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menambah penyediaan pangan,” kata dia.

Panen dilakukan di lahan seluas 13 hektare yang masuk dalam teritori Komando Resor Militer 051/Wijayakarta, Komando Daerah Militer V/Jakarta Raya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, budi daya bawang merah ini berhasil meraup pendapatan kotor hingga Rp 6 miliar dari modal Rp 2,5 miliar. “Bersihnya Rp 1 sampai 2 miliar. Jadi, kita patut bangga dengan pencapaian ini yang dilakukan TNI,” katanya.

Dia mengatakan, pola pertanian ini diyakini mampu mengatasi berbagai persoalan pangan, terutama yang disebabkan cuaca. El Nino beberapa bulan ke belakang memukul produksi pertanian sehingga perlu upaya lebih untuk mencegahnya. **(Tommi Andryandy)*****



TOMMI ANDRYANDY/“PR”

TNI AD bersama Kementerian Pertanian memanen bawang merah di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Selasa (11/6/2024). Panen dilakukan di lahan *urban farming* seluas 13 hektare.*

Title	Pasokan Kurban dan Pangan Aman	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Pikiran Rakyat	
Page	7	
Author	Kismi Dwi Astuti	

Pasokan Kurban dan Pangan Aman

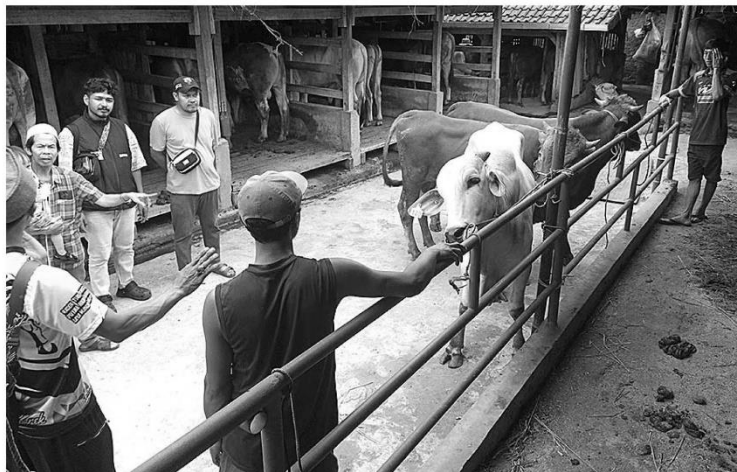
JAKARTA, (PR).-

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa ketersediaan hewan kurban di seluruh Indonesia untuk Iduladha 2024 dalam kondisi surplus. Dengan demikian, ketersediaan hewan kurban dipastikan aman dan mencukupi.

"Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), secara nasional, kebutuhan hewan kurban berada pada angka 1,97 juta ekor. Dengan persediaannya yang mencapai 2,06 juta ekor, maka ketersediaan hewan kurban tahun ini berpotensi surplus hingga 88.000 ekor," kata Mentan seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Rabu (12/6/2024).

Berdasarkan data tersebut, Mentan Amran memastikan jumlah ketersediaan hewan kurban baik sapi, kerbau, kambing maupun domba untuk memenuhi kebutuhan nasional sangat mencukupi bahkan surplus.

"Persiapan kurban insyaallah aman, cukup sampai kita Iduladha nanti. Saya sudah terima laporannya, dan aman, jumlahnya sangat cukup," kata Amran.



*PEDAGANG melayani konsumen yang memilih sapi kurban di Jaya Mandiri Farm, Jalan Kenanga, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Rabu (12/6/2023). Ketersediaan pasokan hewan kurban di seluruh Indonesia untuk Iduladha 2024 dalam kondisi surplus.**

Pangan

Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bahwa ketersediaan maupun harga pangan aman dan stabil menjelang Iduladha 2024.

"Sebagaimana laporan dari para mitra pelaku usaha pangan, kondisi ketersediaan

pangan pokok strategis menjelang Iduladha bisa kami dipastikan aman dan harga relatif stabil," kata Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa.

Ketut menyampaikan, ketersediaan dan harga pangan diproyeksikan aman dan stabil, salah satunya akibat pe-

nurunan permintaan pasar yang bertepatan dengan tahun ajaran baru anak sekolah.

Bapanas juga memastikan terus mengupayakan berbagai aksi intervensi seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), fasilitasi distribusi pangan (FDP), mendorong kerja sama antardaer-

ah (KAD), dan mengadakan gerakan pangan murah (GPM) untuk menjaga disparitas harga di masyarakat untuk menjaga laju inflasi nasional.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, menambahkan bahwa untuk komoditas pangan lain, seperti jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, telur ayam, gula, dan minyak goreng dipastikan stoknya cukup dan harganya stabil.

"Harga pangan di produsen dan pedagang relatif seimbang sehingga masyarakat bisa mendapatkan pangan dengan harga yang wajar," kata Maino. Akan tetapi, stok bawang putih masih terbatas karena ada keterlambatan importasi.

"Dari izin impor bawang putih yang telah diberikan, realisasinya memang masih rendah sekitar 50%. Selain itu, harga di luar masih cukup tinggi dan kualitasnya tidak cukup baik. Kita harap kondisi ini bisa cepat membaik sehingga harga bisa segera normal dan pasokan bisa mencukupi kebutuhan nasional," tutur Maino. **(Kismi Dwi Astuti)*****

Title	Alokasikan Rp 7 Triliun untuk Pompa Air	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Kaltim Post	
Page	13 Part 1	
Author	Ndu	

Alokasikan Rp 7 Triliun untuk Pompa Air

PEMERINTAH mengalokasikan anggaran Rp 7 triliun untuk membeli mesin pompa air guna memitigasi kekeringan. El Nino yang belum berakhir dan masuknya musim kemarau menjadi kekhawatiran adanya kekeringan di berbagai daerah sehingga akan memengaruhi produksi beras dalam negeri.

Selasa (11/6), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dipanggil Presiden Joko Widodo. Kepala negara ingin mengetahui kondisi pangan dalam negeri. Musim tidak menentu menyebabkan produktivitas tanaman turun. "Sekarang masih posisi iklim El Nino berlangsung. Mudah-mudahan Juli–Agustus El Nino selesai," kata Amran.

Baca **ALOKASIKAN...** Hal 19 ■

Title	Alokasikan Rp 7 Triliun untuk Pompa Air	
Date	13 Juni 2024	
Media	Kaltim Post	
Page	13 Part 2	
Author	Ndu	

ALOKASIKAN

Sambungan dari hal 13

El Nino belum selesai, namun sudah masuk musim kemarau. Puncaknya akan terjadi sekitar Agustus hingga Oktober. Tiga bulan ini menjadi bulan rawan. Amran menyebut Jokowi minta adanya solusi. "Kami sudah lakukan sejak Maret. Solusi cepat untuk tangani kondisi El Nino dan kekeringan ini adalah pompanisasi," katanya.

Dengan latar belakang ini, Kementerian Pertanian akan mela-

kukan refocusing anggaran untuk membeli pompa air. "Sebagian perjalanan dinas, acara seminar, kemudian biaya tak penting dulu kami cabut. Kami refocusing, kemudian kami belikan benih, pompa, alat mesin pertanian untuk petani," imbuhnya.

Targetnya, ada 25 ribu pompa yang terpasang. Kini baru 70 persen yang sudah realisasi. Jokowi, menurut Amran, minta agar sebelum Agustus semua selesai. "Rp 7 triliun. Jadi, semua anggaran yang tidak memberikan dampak signifikan pada produksi padi, jagung, dan komoditas strategis kami pindahkan," ujarnya keti-

ka ditanya berapa anggaran yang disiapkan.

Yang menjadi fokus pemerintah adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Menurut dia, dengan pompanisasi, debit air sungai itu akan menjadi solusi cepat dalam mengatasi kekeringan.

"Kalau kita melakukan pompa bisa langsung tanam, tapi kalau cetak sawah itu butuh waktu 1 sampai 3 tahun. Sementara kita butuh pangan sekarang dan negara lain juga sedang kekurangan pangan," ujarnya. (ndu)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Atensi Stok dan Harga Kebutuhan	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Fajar Makassar	
Page	10	
Author	Fit/zuk	



PANTAU HARGA. Bupati Pangkep Muh Yusran Lalogau memimpin sidak harga kebutuhan pokok jelang Lebaran di Pasar Sentral Pangkep, Rabu, 12 Juni.

IST

Atensi Stok dan Harga Kebutuhan

PANGKEP, FAJAR — Pemerintah Kabupaten Pangkep menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Sentral Pangkep, Rabu, 12 Juni. Itu untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Iduladha.

"Sementara terkait stoknya, semua tersedia. Ba-

han pokok yang dibutuhkan masyarakat tersedia jelang Lebaran. Beras harganya stabil, yang sedikit naik harganya itu bumbu, seperti bawang. Tapi harganya bervariasi," papar Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Pangkep Andi Agustina.

Selain itu, ia juga me-

nyebut harga untuk kebutuhan daging sapi dan daging ayam relatif tetap stabil. Sidak dirangkaikan dengan gerakan pasar murah.

Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau yang turun bersama Forkopimda dan pimpinan OPD mengatakan kebutuhan untuk masyarakat harus tetap ter-

sedia memasuki Lebaran.

Terpisah, salah seorang pedagang pasar Sentral Pangkajene Risna mengatakan saat ini harga cabai mengalami kenaikan sejak pekan lalu. Cabai kecil seharga Rp45ribu per kilogram yang sebelumnya seharga Rp25ribu per kilogram. Cabai besar Rp38ribu per kilogram

yang sebelumnya Rp20ribu per kilogram dan cabai keriting Rp45ribu per kilogram.

Sementara tomat seharga Rp15ribu per kilogram. "Paling laku jelang Lebaran, itu cabai. Kenaikan selalu terjadi jelang Lebaran, waktu pemakaian. Cuma kurang barang," imbuhnya. **(fit/zuk)**

Title	Bulog Temukan Stok Jagung Berjamur	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Fajar Makassar	
Page	10	
Author	Ashari PN & Ridwan Marzuki	

Bulog Temukan Stok Jagung Berjamur

REPORTER **ASHARI PN**
EDITOR **RIDWAN MARZUKI**

BONE, FAJAR — Produksi jagung petani bermasalah. Badan Urusan Logistik (Bulog) Bone menemukan banyak stok berjamur.

KONDISI ini membuat petani kesulitan menjual hasil panen mereka ke Bulog. Bulog sendiri telah mendapatkan instruksi dari Kementerian Pertanian untuk menyera-
p jagung petani Rp5 ribu per kg. Sayangnya, kualitasnya dilaporkan masih buruk.

"Jadi rata-rata yang kami temukan di lapangan itu adalah jamur, itu khusus di

Bone, belum lagi kasar air, sampai butir rusak," jelas Kepala Kantor Cabang Bulog Bone Maysius Patinting-an, kemarin.

Temuan ini setelah pihaknya melakukan tinjauan langsung ke lapangan. Kandungan air dalam jagung masih di kisaran 20-an persen. Ini tak sesuai standar yang ditetapkan Bulog,

yakni 12 atau maksimal 15 persen.

Masih banyak petani yang memanen tak sesuai standar. Panen lambat dilakukan, ada pula yang menyimpan lama menunggu harga naik untuk dijual, sehingga jagung akhirnya berjamur. Para petani juga banyak yang langsung menjual tanpa menjemurnya lebih dahulu.

Padahal, standar kualitas harus terpenuhi lantaran jagung yang diserap ini dipersiapkan untuk disimpan lama. "Jadi seumpama dia lewat dari yang dipersyaratkan, butir rusak, berjamur, kan-

dungan air (tinggi), itu akan cepat rusak," jelas Maysius.

Pihaknya sempat menyera-
p jagung dengan kadar air tinggi, namun rusak menghitam hanya dalam waktu tiga bulan saja.

Salah seorang petani di Kecamatan Amali, Abdul Wahid, mengaku cukup lamban memanen jagung karena kurang tenaga. Petani biasanya menggunakan jasa buruh untuk membantu panen. Namun, itu sulit lantaran banyak yang menggunakan jasa mereka.

Alhasil jagung-jagung ini lama dibiarkan, meski masa panen telah tiba. "Tidak ada

yang bantu, kita biasa tunggu dulu sampai ada yang bisa bantu, apalagi ini luas sekali," terangnya.

Sementara petani jagung lainnya di Kecamatan Kahu, Muh Agung mengakui pernah menyimpan jagung panen hingga beberapa bulan, lalu banyak yang rusak. "Dulu masih simpan karena kita menunggu harga naik dulu baru kita jual," ujarnya.

Sekarang pihaknya sudah meninggalkan metode tersebut, agar menjaga kualitas jagung tetap baik. "Sekarang disimpan paling lama sebulan, kita sudah jual," jelasnya. (*)

Title	Bungo Terima Bantuan Alsintan dari Kementan RI	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Jambi Ekspres	
Page	5	
Author	Aes	

Bungo Terima Bantuan Alsintan dari Kementan RI

MUARA BUNGO – Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas TPH dan Perkebunan kembali menerima bantuan puluhan unit alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Kepala Dinas TPHBun Kabupaten Bungo, Muhammad Hasbi, mengatakan, masing-masing bantuan yang diterima sebanyak 20 unit Alsintan dan 15 Pompa Air. “Bantuan 20 unit ini jika di kalkulasi nilai anggarannya sebanyak Rp1 miliar, kemudian juga ada mesin Pompa Air 15 unit,” ujar M. Hasbi.

Ia juga mengungkapkan, bantuan tersebut hasil dari proposal yang telah diajukan dan disetujui oleh Bupati Bungo beberapa waktu lalu yang ditujukan untuk Kementerian Pertanian RI di Jakarta.

Peralatan tersebut kata Hasbi, akan disalurkan langsung ke kelompok tani (poktan) yang sudah mengajukan proposal kepada pihaknya.

“Semoga bantuan ini dapat meningkatkan luas tanam dan produktivitas pertanian. Ini juga merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah untuk membantu para petani, dan kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas bantuan ini,” tandasnya.(aes)

Title	Jelang Idul Adha, Pastikan Harga Bahan Pangan Stabil	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Magelang Ekspres	
Page	1 Part 1	
Author	Dis	



foto dok
PANGAN. Bapanas Pastikan Ketersediaan dan Harga Bahan Pangan Aman dan Stabil Jelang Idul Adha.

Jelang Idul Adha, Pastikan Harga Bahan Pangan Stabil

JAKARTA-Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan, bahwa ketersediaan pangan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 2024 terpantau aman dan terkendali.

Harga pangan juga diproyeksikan stabil salah satunya, akibat penu-

runan permintaan pasar yang bertepatan dengan tahun ajaran baru anak sekolah.

Hal ini ditegaskan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa usai memimpin Rakor HBKN Idul Adha 2024 yang dihadiri selu-

ruh stakeholder, lusa kemarin.

"Sebagaimana laporan dari para mitra pelaku usaha pangan, kondisi ketersediaan pangan pokok strategis jelang Iduladha bisa kita dipastikan aman dan harga pangan relatif stabil," ujar Ketut.

ke hal 3



Title	Jelang Idul Adha, Pastikan Harga Bahan Pangan Stabil	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Magelang Ekspres	
Page	1 Part 2	
Author	Dis	

Jelang Idul Adha, Pastikan Harga...

Sambungan hal 1

Tapi kita, lanuut Ketut juga minta agar semua pihak agar secara bersama-sama terus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan,

Untuk hal inilah, Bapanas akan terus mengupayakan berbagai aksi intervensi seperti Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Kerja sama Antar Daerah (KAD), dan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga disparitas harga di masyarakat guna menjaga laju inflasi nasional.

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang ada di Perum Bulog dan ID FOOD akan dioptimalkan untuk memenuhi ke-

butuhan daerah-daerah yang minim ketersediaan produksi dan tergantung pasokan dari luar seperti Kalimantan Utara, Maluku, serta wilayah Papua.

"Jadi sebagaimana arahan Kepala NFA Bapak Arief Prasetyo Adi agar semua pihak melaporkan apabila terdapat kekurangan stok bahan pangan, sehingga bisa segera dipasok oleh BUMN Pangan," kata Ketut.

Dari hasil Rakor diketahui ketersediaan hewan kurban cukup, baik sapi, kerbau, atau kambing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan kecenderungan harga stabil seperti tahun 2023.

Kecenderungan pembelian hewan kurban masyarakat berada di bobot

atau harga yang rendah mengingat ada kebutuhan lainnya seperti tahun ajaran baru anak sekolah.

Adapun untuk komoditas pangan lain seperti jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, telur ayam, gula, dan minyak goreng dipastikan stoknya cukup dan harganya stabil.

Harga pangan di produsen dan pedagang relatif seimbang sehingga masyarakat bisa mendapatkan pangan dengan harga yang wajar.

"Dari izin impor bawang putih yang telah diberikan, realisasinya memang masih rendah sekitar 50 persen," ujar Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan NFA Maino Dwi Hartono dalam ketera-

ngan resminya pada Rabu (12/06).

Selain itu, harga di luar masih cukup tinggi dan kualitasnya tidak cukup baik.

"Kita harap kondisi ini bisa cepat membaik sehingga harga bisa segera normal dan pasokan bisa mencukupi kebutuhan nasional," kata Maino Dwi Hartono.

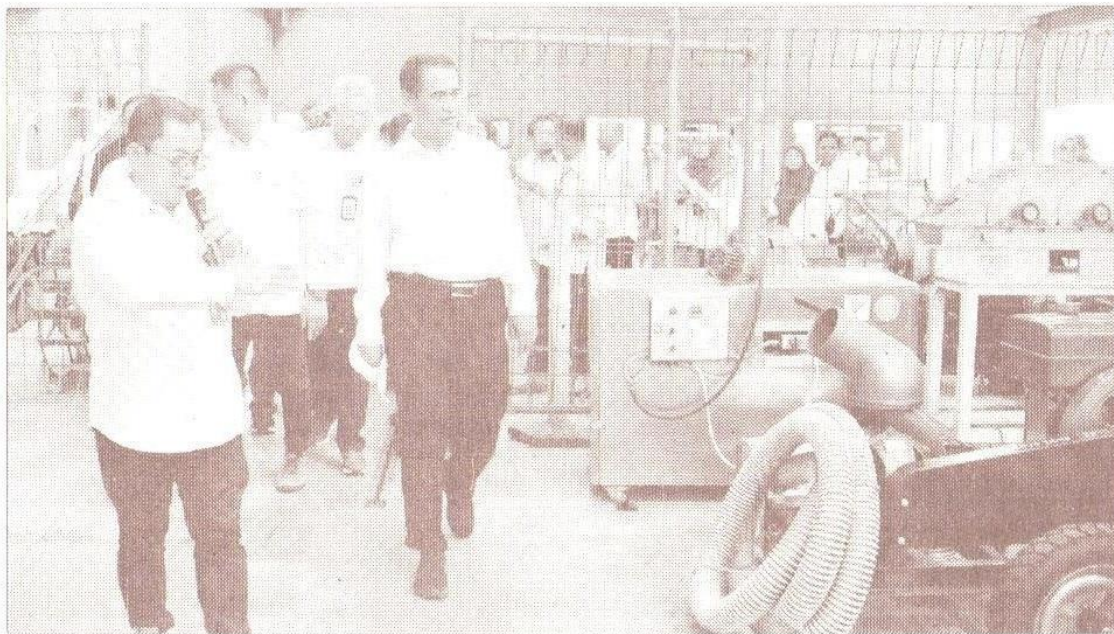
Di sisi lain, kondisi yang perlu diantisipasi ialah memasuki bulan kemarau di bulan Juli 2024 yang akan diikuti dengan kemungkinan meningkatnya permintaan pasar karena banyaknya hajatan-hajatan di masyarakat.

Termasuk untuk komoditas telur, diperkirakan justru harganya akan naik pasca Idul Adha 2024. **(dis)**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Mentan Pantau Proses Uji Alsintan di Serpong	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Tangerang Ekspres	
Page	3 Part 1	
Author	Esa	



ENDANG SAHRONI/TANGERANG EKSPRES

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan ke BBPSI Mektan) Serpong, Rabu, 12 Juni 2024.

Mentan Pantau Proses Uji Alsintan di Serpong

SERPONG—Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong penggunaan teknologi dan mekanisasi secara masif guna menekan biaya produksi secara signifikan sehingga mampu meningkatkan produktivitas secara maksimal. Menurutnya, teknologi terbukti mampu menjadikan pertanian Indonesia jauh

lebih kuat dan tahan terhadap berbagai ancaman.

"Pertanian itu semua harus dibuat sederhana, simpel, murah dan terjangkau. Dan yang pasti petani harus kita giring untuk berbisnis. Makanya mereka harus diberi untung," ujar Mentan di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan) Ser-

pong, Rabu, 12 Juni 2024.

Saat ini, kata Mentan, BBPSI Mektan baru saja menyelesaikan proses uji alat mesin pertanian terhadap pompa. Di sana, Mentan juga meninjau langsung uji lapang jarwo transplanter. Rencananya semua alat tersebut akan dipasarkan dengan harga yang terjangkau.

► Bersambung **Hal.9**

Tittle	Mentan Pantau Proses Uji Alsintan di Serpong	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Tangerang Ekspres	
Page	3 Part 2	
Author	Esa	

Mentan Pantau

Sambungan Dari Hal.3

"Alur alokasinya bisa kita kolaborasikan dengan swasta atau membuatnya secara massal. Yang terpenting, selesaikan dulu apa yang sudah kita kerjakan ini agar bisa menjangkau petani di seluruh Indonesia," katanya.

Mentan mengatakan, peralatan yang sudah masuk tahap uji ini nantinya akan dijual di kisaran harga yang terjangkau petani. Harga tersebut bahkan bisa jauh lebih murah apabila pasar dan skema penjualan sudah menemukan kecocokan.

"Tadi saya tanya harga satu unitnya 17 juta, tapi saya bilang kalau di bawah 10 juta bisa tidak, atau bahkan 5 juta. Sebab kalau ini terjadi yakinlah kita bisa swasembada. Bayangkan. Satu hektare bisa satu hari kalau dulu 20 orang satu hari. Artinya apa? Ini pertanian yang sangat efisien tapi bisa meningkatkan keseragaman tanam," katanya.

Mentan berharap, ke depan, pertanian Indonesia bisa menjadi contoh bagi pertanian dunia. Artinya, mulai dari mengolah lahan, menanam,

memupuk sampai memanen sudah menggunakan teknologi dan mekanisasi yang diproduksi di dalam negeri.

"Ke depan kita harus menggunakan teknologi karena milenial akan ikut bekerja manakala pertanian kita sudah menguntungkan perlengkapan modern," katanya.

Sebagaimana diketahui, program Perluasan Areal Tanam (PAT) melalui optimalisasi lahan dan pompanisasi terus digaungkan oleh Kementerian Pertanian sebagai langkah peningkatan produksi dalam menghadapi dampak perubahan iklim seperti kekeringan atau el nino panjang.

Kepala BSIP, Fadry Djufray menerangkan bahwa dalam melakukan pengujian pompa, BSIP mengacu pada SNI ISO/IEC 17025:2017, termasuk di antaranya manajemen sistem, kompetensi teknis personel, validitas metode pengujian, serta keandalan hasil pengujian.

"Setiap pengujian kami pastikan telah sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku, sehingga dapat memberikan hasil uji yang akurat dan dapat dipercaya," tuturnya. (esa)

Title	Pemkab dan Petani Tanam Cabai di Sekotong	
Date	13 Juni 2024	
Media	Suara NTB	
Page	11	
Author	Her	



TANAM - Pj Bupati Lobar H Ilham, Forkopimda, Kadistan Damayanti Widyaningrum dan jajaran OPD menanam bibit Cabai bersama petani di Desa Persiapan Pesisir Mas Sekotong. (Suara NTB/her)

Pemkab dan Petani Tanam Cabai di Sekotong

Giri Menang (Suara NTB) -

Sebanyak 15 ribu bantuan bibit Cabai disalurkan Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Dinas Pertanian di wilayah Sekotong. Bantuan diberikan kepada petani dan ibu rumah tangga untuk ditanam di pekarangan. Selain memberikan bantuan bibit, Pemkab juga melakukan penanaman Cabai bersama petani di Dusun Gawah Pusak, Desa Persiapan Pesisir Mas, Rabu (12/6).

Program ini sebagai salah satu upaya menjaga produksi Cabai untuk mencegah terjadinya Inflasi Daerah. Penyaluran bantuan dilakukan oleh Pj Bupati Lobar, H Ilham, Forkopimda, Kadis Pertanian Damayanti Widyaningrum, Kepala

OPD, Camat, Forkopimcam dan Pj Kades setempat. Bantuan bibit diberikan kepada kelompok tani dan warga. Usai menyerahkan bantuan, Pj Bupati dan jajaran Forkopimda bersama warga mengajak petani menanam bibit tersebut di lahan milik petani daerah setempat.

Pj Bupati mengatakan sebagai upaya Pemkab mengamankan produksi dan mencegah inflasi, pihak Pemda membantu bibit kepada para petani dan ibu rumah tangga. "Kami juga bersama para petani di Desa Persiapan Pesisir ini menanam bibit cabai," katanya. Penyaluran bantuan ini diharapkan mampu menjaga stok cabai di daerah agar tidak mengalami kelangkaan

dan menjaga stabilitas harga pasar jelang Idul Adha.

Terkait kendala air yang dihadapi warga, pihak Pemda akan memprogramkan pembangunan sumur dangkal dan pompa untuk menaikkan air sehingga memenuhi kebutuhan untuk mengairi cabai dan tanaman lainnya bisa terpenuhi. Meskipun tidak bisa 100 persen, namun begitu petani butuh air, warga bisa mendapatkan air. Selain itu, pupuk juga dipastikan tersedia bagi petani. Pihak Pemkab mengatensi ketersediaan dan distribusi pupuk bagi petani.

Selain di Sekotong, Pemkab juga melaksanakan gerakan taman Cabai di Lembar seluas 10 hektar. Pihaknya juga mem-

bagikan bantuan bibit Cabai kepada keluarga untuk menanam di pekarangannya. Bantuan bibit ini akan diberikan pada waktu yang tepat, sehingga ketika harga Cabai di pasaran naik warga tidak harus bergantung pada ketersediaan di pasar, namun bisa memenuhi kebutuhan Cabai di rumahnya sendiri.

Tak sampai disitu, petani yang merugi pun akan berupaya dibantu Pemda melalui bantuan bibit ini. Dan mendorong warga untuk ikut asuransi pertanian. Pihak Pemda juga menyiapkan penyuluh pertanian untuk memantau dan membantu para keluarga bagaimana menanam dan memelihara. Sehingga mereka menanam sampai produksi,

paling tidak untuk kebutuhan rumah tangga.

Sementara itu, warga setempat mengapresiasi upaya Pemda menyalurkan bantuan bibit. Mereka berharap Pemda juga memberikan bantuan pengairan ladang mereka. Nurdin Sekretaris Poktan Gawah Puduk 1 mengatakan, bahwa petani sangat terbantu dengan bantuan bibit cabai ini. Sebab bisa mengurangi beban biaya yang dikeluarkan petani. "Sangat membantu petani," ujarnya. Namun demikian pihaknya berharap ada bantuan sumur dangkal dan pompa untuk mengairi lahan petani ketika membutuhkan air untuk tanaman Cabai. (her)

Title	Gelar Potensi Pertanian Ajang Petani Perkotaan Unjuk Gigi	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Kedaulatan Rakyat	
Page	2	
Author	Dhi-f	

DUA VARIETAS MANGGA DI KRATON KANTONGI SERTIFIKASI

Gelar Potensi Pertanian Ajang Petani Perkotaan Unjuk Gigi

YOGYA (KR) - Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya memfasilitasi gelar potensi pertanian, 12-14 Juni 2024. Kegiatan yang digelar di halaman Balaikota Yogya itu menjadi ajang bagi petani perkotaan untuk unjuk gigi atas hasil inovasi pertanian.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto, menilai banyak potensi pertanian perkotaan yang selama ini masih bisa dikembangkan menjadi produk unggulan.

"Lahan untuk pertanian di Kota Yogya memang terbatas jika dibanding kabupaten lain namun itu justru menjadi tantangan untuk melakukan inovasi. Bukan kuantitas produk yang diunggulkan melainkan kualitas dan pengembangannya," ungkapnya di sela pembukaan gelar potensi pertanian, kemarin.

Beberapa potensi pertanian perkotaan yang dipamerkan dalam ajang tersebut antara lain hasil budidaya buah dan sayuran, hasil olahan pangan

serta teknologi pertanian. Perwakilan setiap gabungan kelompok tani (gapoktan) di masing-masing kemantren juga ikut dilibatkan mendisplay produk unggulan. Pada kesempatan itu turut dilakukan panen sorgum sebagai bentuk dukungan diversifikasi pangan yang digencarkan oleh pemerintah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya Sukidi, menambahkan lahan sawah yang masih tersisa di Kota Yogya hanya mencapai sekitar 47,74 hektare. Seluruhnya juga hanya tersebar di Umbulharjo, Tegalrejo dan Kotagede. Hasil produk pertanian itu dipastikan tidak akan mencukupi kebutuhan

hasil diterbitkan. Dua varietas mangga tersebut ialah Semar dan Cempura, serta dipastikan merupakan varietas baru yang belum pernah ada di dunia.

"Penamaan dua buah mangga itu dilakukan langsung oleh Ngarsa Dalem. Sedangkan pengajuan sertifikasi sudah kami proses sejak tiga tahun lalu, dan baru terbit kali ini. Kami serahkan sertifikasinya ke pihak Kraton," urainya.

Dua jenis mangga yang ada di kompleks Kraton memiliki ciri yang berbeda dari bentuk daun dan rantingnya. Jika umumnya daun mangga cenderung mengembang serta rantingnya menurun, namun varietas di Kraton memiliki daun yang ramping dan ranting tegak ke atas. Bentuk buahnya cenderung lebih kecil dan konon rasanya sangat manis. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya juga sudah melakukan penyelidikan bibit namun belum

Saat ini kami juga tengah memproses pengajuan sertifikasi satu jenis mangga lagi yang ada di Kraton. Ada puluhan jenis mangga dengan usia yang sangat tua," jelasnya.

(Dhi-f)



KR Andri Vahdani

Sekda DIY bersama pejabat Kementerian Pertanian serta Pj Walikota Yogya meninjau gelar potensi pertanian.

pangan bagi 375.699 jiwa penduduk Kota Yogya.

"Kalau mengejar kuantitas jelas tidak akan mampu. Tetapi bagaimana kita dorong para gapoktan untuk berinovasi. Lahan pekarangan pun bisa dimanfaatkan, misalnya budidaya tabulampot dan dijual beserta potnya. Nilai ekonominya jauh lebih tinggi," urainya.

Oleh karena itu melalui gelar potensi pertanian kali ini jajarannya berupaya

menjembatani keberhasilan para gapoktan dalam menjalankan usahanya kepada masyarakat luas. Harapannya semangat untuk menggeluti pertanian perkotaan bisa terus berkobar serta banyak generasi muda yang turut terlibat.

Di samping itu, momentum kemarin turut menjadi kebanggaan lantaran sertifikasi atas dua varietas mangga yang berada di kompleks Kraton Yogyakarta ber-

Tittle	Sapi Kurban Jokowi Seberat ton Akan Disembelih di Bone	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Serambi Indonesia	
Page	6	
Author	Rol	



SERAMBI/HENDRI

HEWAN QURBAN- Pedagang memasarkan ternak sapi untuk kebutuhan kurban menjelang hari raya Idul Adha di pasar hewan tradisional Desa Sibreh, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (12/6/2024). Kementerian Pertanian mencatat ketersediaan hewan kurban secara nasional, baik sapi, kambing atau domba untuk Idul Adha adalah sebanyak 2,06 juta ekor, sementara kebutuhan hewan kurban sebanyak 1,97 juta ekor atau surplus sebanyak 88 ribu ekor.

Sapi Kurban Jokowi Seberat 1 ton Akan Disembelih di Bone

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melaksanakan kurban di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Untuk Idul Adha pada tahun ini, Kepala Negara menyumbangkan seekor sapi dengan bobot 1 ton. Hewan kurban yang akan disembelih di Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tersebut merupakan sapi berjenis Ilmousin.

“Sapi kurban dari Bapak Presiden akan dipotong di daerah Bone. Pihak Sekretariat Negara sudah finalisasi dan menetapkan sapi yang akan jadi hewan kurban,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Sulsel, Nurlina Saking, di Makassar, Rabu (12/6/2024).

Ia mengaku, tidak mengetahui secara pasti berapa harga sapi kurban Presiden Jokowi itu. Bagaimanapun, diperkirakan hewan kurban ini setara dengan nilai lebih dari Rp 80 juta.

Nurlina mengatakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel telah melakukan pembekalan untuk para juru potong. Program ini menyasar seribu takmir masjid di provinsi setempat agar mereka bisa melakukan tugasnya secara halal dan baik (thoyyib).

Ia menambahkan, aspek

kesehatan hewan juga penting diperhatikan. Sebab, tidak sedikit hewan ternak yang terlihat sehat, padahal sedang sakit.

Karena itu, ia memastikan, Dinas Peternakan di berbagai daerah telah turun ke masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Konsumen akan terbantu dengan penjual yang sudah memegang surat keterangan sehat tentang hewan kurban.

“Semua sudah bergerak dan pastikan mendapat surat keterangan sehat untuk setiap hewan kurban di kabupaten/kota yang disiapkan untuk Idul Adha,” ujarnya.(rol)

Tittle	Produksi Beras Tahun Ini Diprediksi Minus 5 Juta Ton	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Gorontalo Post	
Page	12	
Author	Net	

Produksi Beras Tahun Ini Diprediksi Minus 5 Juta Ton

JAKARTA-GP - Badan Pangan Nasional mengungkapkan ada potensi kekurangan produksi beras tahun ini mencapai 5 juta ton. Meski begitu pihaknya masih yakin produksi dalam negeri bisa digenjut. "Ini potensi kekurangan, kurang lebih 5 juta ton, potensi kekurangan (produksi tahun ini)," jelas kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, ditemui di DPR RI, Senin (10/6).

Saat ditanya, apakah akan ada penambahan impor beras tahun ini, Arief belum bisa memastikan. Ia menyebut saat ini saja masih ada kuota impor beras 1,6 juta ton yang belum dilakukan.

Tahun ini pihaknya

bersama Perum Bulog baru menyelesaikan impor beras sebanyak 2 juta ton.

"Sekarang saja dari 3,6 juta ton (kuota impor beras) baru 2 juta ton juga. Nanti kalau diperlukan (impor dilakukan). Kita usahakan dalam negeri, kita lagi minta dorong produksi dalam negeri. Sayang kalau 3 juta ton saja itu Rp 30 triliun, sayang kita ambil dari luar (luar negeri)," jelasnya.

Arief mengatakan untuk melakukan impor cukup sulit karena prosedur yang dilakukan rumit. Hal itu terkait dengan pencarian barangnya, kemudian harga yang tak menentu karena mengikuti kurs dolar, hingga bongkar

muat di pelabuhan yang memakan waktu. "Ambil dari luar itu kan juga effort, kita nggak mudah cari barang, currency sudah Rp 16.200, hari ini sudah Rp 16.300, sayang. Mendingan di Indonesia, apapun caranya ya termasuk ketersediaan air, pupuk, benih, penambahan luas lahan yang itu

kewenangannya ada di Kementan," terang dia.

Dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Arief mengungkapkan produksi pada Januari sampai Juli 2024 saja diprediksi menurun 2,64 juta ton. Angka itu didapat dari proyeksi Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS). **(net)**

Title	Pemprov Banten Mitigasi Inflasi Jelang Idul Adha	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

Pemprov Banten Mitigasi Inflasi Jelang Idul Adha

NERACA

Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mitigasi inflasi menjelang Idul Adha 1445 hijriah dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, mengatakan komoditi yang selama ini menjadi penyumbang inflasi harganya akan terus dijaga agar stabil hingga perayaan Idul Adha.

"Secara nasional sudah terkendali, saya harap harga di Banten bisa terus ditekan," ucap Al Muktabar di Serang, Banten, Senin (10/6).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Inflasi Provinsi Banten pada Mei 2024 sebesar 2,86 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 106,05 persen.

Al menyampaikan komoditi pangan yang perlumen- dapatkan perhatian dalam pengendalian inflasi di antaranya bawang merah, bawang putih, cabai, telur ayam ras, daging ayam ras dan komoditi lainnya.

"Kita terus melakukan pengendalian inflasi, karena jika inflasi terlalu tinggi akan menjadi masalah dan terlalu rendah juga akan menjadi masalah. Jadi kita terus melakukan langkah-langkah, termasuk menjaga ketersediaan dan harga komoditi pokok," katanya.

Pada Idul Adha terdapat komoditi tertentu yang diminati masyarakat akan mengalami peningkatan sehingga harus diantisipasi, maka dari itu dilakukan mitigasi inflasi dengan menggelar pasar murah, melakukan pengawasan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman. ● ant

Title	PG Jatitujuh Diminta Serap Gula Petani	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	11	
Author	Ant/gro	

PG Jatitujuh Diminta Serap Gula Petani

NERACA

Majalengka – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi meminta Pabrik Gula (PG) Jatitujuh di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, agar menyerap produksi gula petani dengan harga minimal Rp-14.500 per kilogram (kg).

"Pesan saya kepada Direktur PG (Pabrik Gula) Jatitujuh membeli tebu gulanya petani minimal Rp14.500 (per kg). Saya ulangi ya minimal Rp-14.500 (per kg)," kata Arief, di Majalengka, mengutip laman Antara.

Arief didampingi Bupati Indramayu Nina Agustina, Dandim 0616 Indramayu Letkol Inf Yanuar Setyaga meninjau produksi PG Jatitujuh guna memastikan penyerapan sesuai harga yang ditentukan oleh pemerintah.

"Kita tadi sama Bupati (Indramayu Nina Agustina) sama Pak Dandim (0616 Indramayu Letkol Inf Yanuar Setyaga), dan Pak

Direktur (Utama PT Pabrik Gula Rajawali II Ardian Wijanarko), kita lihat mereka ini sudah mulai musim giling. Kurang lebih tiga minggu lalu. Tiga minggu lalu ini serentak di Jawa Barat di Jawa Timur," ujar Arief.

Arief menyampaikan bahwa pihaknya mendorong pabrik gula tersebut dapat menyerap produksi gula dari petani lokal agar mereka terus meningkatkan produktivitas mereka dalam menghasilkan tebu sebagai bahan baku dalam memproduksi gula.

"Supaya petaninya itu giat untuk tanam. Ini tanaman semusim. Tebu itu satu kali satu tahun. Kalau beras bisa tipe 200 bisa 300 juga bisa dua, bisa tiga (kali tanam setahun). Kalau tebu ini sekali," ujar Arief.

Arief menyatakan bahwa jika pabrik gula tidak memiliki pasokan tebu, maka pabrik tersebut akan menjadi tidak efektif karena tidak memiliki bahan baku utamanya. Oleh

karena itu, pabrik gula yang berdiri di lahan seluas 15.000 hektare tersebut agar dapat dimanfaatkan maksimal.

"Karena kalau pabrik gula enggak punya sumber tebu, itu nanti kita lucu pabrik enggak ada tebunya gitu. Jadi 15.000 hektare ini memang untuk dedikatif untuk tebu," kata Arief.

Selain itu, Arief juga meminta kepada seluruh produsen gula yang ada di bawah naungan BUMN agar menyerap produksi gula petani lokal Rp14.500 per kilogram.

Arief menyebutkan PG Jatitujuh merupakan satu dari enam cabang dari PT PG Rajawali II.

Arief merinci enam enam cabang PT PG Rajawali II, yakni PG Jatitujuh

di Majalengka; PG Sindanglaut di Cirebon; PG Krebet Baru di Malang; PG Tersana Baru di Cirebon; PG Rejo Agung di Madiun, dan PG Candi Baru di Sidoarjo.

"Sehingga nanti PG-PG (pabrik gula-pabrik gula) yang ada di Indonesia ini baik RNI (Rahawali Nusantara Indonesia), ID Food ataupun PTPN (PT Perkebunan Nusantara) menjadi stand by buyer. Meng offtake gula yang udah jadi itu dibelinya Rp14.500 per kilogram," ujar Arief.

Lebih lanjut Arief mengatakan bahwa harga gula di produsen tingkat petani ditetapkan sebesar Rp-14.500 per kg, lalu di masyarakat sebesar Rp17.500 per kg. ● ant/gro

Tittle	Bey Dorong Jabar Tingkatkan Produksi Bawang Merah	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

Bey Dorong Jabar Tingkatkan Produksi Bawang Merah

NERACA

Bandung - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mendorong Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan produksi bawang merah.

Pasalnya, kata Bey, bawang merah memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi salah satu penyumbang inflasi di Indonesia. Karenanya, peningkatan produksi bawang merah menjadi salah satu fokus utama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Kita tahu bahwa bawang merah ini juga bisa menjadi penyumbang inflasi. Kami ingin lebih masif lagi," kata Bey dalam keterangan di Bandung, Selasa (11/6).

Menurut Bey, Pemprov Jabar terus berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas bawang merah, serta mendorong produksi padi lebih dimasifkan hingga dapat mensejahterakan masyarakat.

"Kami dorong lebih masif lagi agar produksi pangan khususnya padi lebih masif dan lebih tersebar ke seluruh Indonesia, sehingga akan menekan angka inflasi," ucapnya.

Bey optimistis jika dalam setahun bisa melakukan panen sebanyak dua sampai empat kali, Jabar dapat menjadi sentra bawang terbesar di Indonesia.

"Kalau memang cocok, dan bisa dua atau empat kali (panen) dalam setahun, jadi kenapa tidak, jika kita bisa. Kita jadikan sentra bawang terbesar di Tanah Air," tuturnya.

Bey pun berharap dengan berbagai upaya yang dilakukan, produksi dan produktivitas bawang merah di Jabar dapat terus meningkat. Hal itu tentunya akan membawa manfaat bagi para petani bawang merah dan masyarakat Jabar. ● ant

Title	Ombudsman Kawal Percepatan Penyaluran 9,55 Juta Ton Pupuk Bersubsidi	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	12	
Author	Ant	

Ombudsman Kawal Percepatan Penyaluran 9,55 Juta Ton Pupuk Bersubsidi

NERACA

Banjarmasin - Ombudsman mengawal percepatan penyaluran pupuk bersubsidi yang totalnya telah ditetapkan pemerintah sebanyak 9,55 juta ton pada tahun 2024 dari sebelumnya 4,7 juta ton.

"Semua harus bergerak mendukung kelancaran penyalurannya dan kami terus mengawal segala upaya percepatannya," kata anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dikutip Antara, kemarin.

Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia (Persero), sampai dengan 27 Mei 2024 telah disalurkan pupuk bersubsidi sebesar 2,33 juta ton atau setara 24,5 persen dari total alokasi subsidi pupuk yang sebesar 9,55 juta ton secara nasional.

Yeka mengungkapkan, sejumlah sumbatan yang selama ini menjadi penyebab ketidaklancaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi telah dipetakan Ombudsman.

Antara lain masih banyak petani tidak terverifikasi sebagai yang berhak menerimanya dengan segala kendala. Kemudian masih ada petani yang masuk sebagai penerima padahal tahun-tahun sebelumnya tidak pernah menebusnya.

Ketiga, tidak adanya payung hukum bagi distributor atau pengecer dalam penyaluran lantaran surat keputusan (SK) belum diteken sejumlah kepala daerah.

"Kementerian Pertanian harus menekan daerah agar segera menerbitkan SK, paling tidak pertengahan Juni sudah bisa disalurkan bagi yang belum," katanya.

Yeka juga menekankan perlunya penyederhanaan dalam verifikasi dan validasi karena sistem selama ini tidak membuat nyaman petugas di lapangan dan merugikan PT Pupuk Indonesia. Faktanya banyak subsidi sudah disalurkan tetapi nilainya tidak bisa ditagih.

"Aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) yang

sudah terimplementasi di sekitar 27.000 kios resmi di seluruh Indonesia juga harus dipastikan bisa diakses lebih baik oleh petani," jelasnya.

Yeka pun mendesak pemerintah meningkatkan fee margin yang bisa didapatkan distributor dan kios lantaran selama ini untuk tingkat kios hanya Rp75 per kilogram dan Rp50 di tingkat distributor.

Dia membandingkan dengan fee margin elpiji subsidi 3 kilogram yang lebih besar yakni Rp800 per kilogram.

"Fee margin bagi kios dan distributor untuk pupuk bersubsidi ini berlaku sejak 2010, kalau begini terus semakin membuka peluang penyelewengan dan masyarakat yang menyalurkan mengundurkan diri," ucapnya.

Sementara Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Tri Wahyudi Saleh mengatakan sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2024 dan Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024, penambahan alokasi pupuk subsidi bisa dimanfaatkan oleh petani terdaftar atau petani yang memenuhi kriteria sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2024 yaitu tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK). Adapun pupuk bersubsidi ini diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Dari jenis-jenis usaha tani tersebut, ditetapkan bahwa kriteria luas lahan yang diusahakan maksimal dua hektar termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada aturan baru ini, Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dapat dievaluasi empat bulan sekali pada tahun berjalan. ● ant

Title	Panen Raya Bawang Merah Bantu Tekan Inflasi di Kabupaten Bekasi	 Kementerian Pertanian
Date	13 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

Panen Raya Bawang Merah Bantu Tekan Inflasi di Kabupaten Bekasi

NERACA

Kabupaten Bekasi - Panen raya komoditas bawang merah di atas lahan pertanian perkotaan atau 'urban farming' milik Korem 051/WKT Kodam Jaya, di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dinilai mampu membantu menekan laju inflasi daerah.

Pelaksana Harian Bupati Bekasi Iyan Priyatna mengatakan bawang merah merupakan salah satu komoditas dengan nilai tinggi yang mampu mempengaruhi kehidupan petani, perekonomian makro, sekaligus penyumbang inflasi di daerah.

"Pemkab Bekasi menyambut baik inovasi dari Kementan dan TNI AD dalam mengembangkan lahan pertanian di daerah kami, terlebih panen bawang merah ini juga berkontribusi menekan laju inflasi," kata Iyan Priyatna, di Cikarang, Selasa (11/6).

Ia menjelaskan harga komoditas bawang merah yang cenderung berfluktuasi ini memegang kontribusi sangat signifikan terhadap angka inflasi khususnya di Kabupaten Bekasi.

"Inovasi pemanfaatan lahan tidur seluas 13 hektare ini, juga sangat efektif untuk mengendalikan stabilitas harga apalagi bawang merah memegang kontribusi yang signifikan dan dominan," katanya.

Berdasarkan Rapat Koordinasi Inflasi Daerah bersama Kemendagri, pemerintah daerah dituntut melakukan upaya konkret dengan mengembangkan komoditas pangan unggulan agar laju inflasi daerah dapat dikendalikan.

"Sejauh ini Pemkab Bekasi sangat aman terkendali dalam menekan inflasi daerah. Kami juga terus berupaya mendorong dan memperkuat kerja sama berbagai pihak dalam mengembangkan komoditas pangan yang menjadi unggulan, termasuk bersama korem dan Kementan ini," katanya pula.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Mahmudin menyambut baik jalinan kerja sama antara Kementerian Pertanian, TNI, dan Pemkab Bekasi mengembangkan lahan tidur bernilai ekonomis sebagai upaya penguatan angka inflasi daerah.

Dia berharap inovasi urban farming ini mampu menjadi percontohan bagi daerah lain khususnya yang memiliki lahan tidur untuk dimanfaatkan sebagai kawasan pen jaga ketahanan pangan.

"Pemprov Jabar menyambut baik kerja sama seperti ini yang membantu menekan angka inflasi. Saya berharap bisa dijadikan contoh di daerah lain dalam upaya memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif," kata dia. ● ant